

**BENTUK POLA SEBARAN KOMPONEN PERMUKIMAN DALAM  
KAWASAN BENTENG KOTA MUNA**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian  
Guna memperoleh gelar Sarjana Sastra pada Fakultas Ilmu Budaya**

**Univeritas Hasanuddin**

**OLEH**

**La Ode Muhamad Shidiq  
F611 14 013**

**DEPARTEMEN ARKEOLOGI**

**FAKULTAS ILMU BUDAYA**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2021**

## LEMBAR PENGESAHAN

**UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS ILMU BUDAYA**

**LEMBAR PENGESAHAN**

Sesuai Surat Tugas Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin Nomor: **83/UN4.9.1/KEP/2020 tanggal 13 Januari 2020**, dengan ini kami menyatakan menerima dan menyetujui skripsi ini.

Makassar, 05 Agustus 2020

Pembimbing I

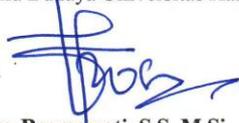
Pembimbing II

  
**Yadi Mulyadi, S.S., M.A.**  
Nip. 198003192006041003

  
**Dr. Hasanuddin, M.A.**  
Nip. 1962102419911031001

  
Disetujui untuk diteruskan  
Kepada Panitia Ujian Skripsi.  
Dekan,

u.b. Ketua Departemen Arkeologi  
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin

  
**Dr. Rosmawati, S.S., M.Si.**  
Nip. 197205022005012002

## LEMBAR PERSETUJUAN

### SKRIPSI

#### BENTUK POLA SEBARAN KOMPONEN PERMUKIMAN DALAM KAWASAN BENTENG KOTA MUNA

Disusun dan diajukan oleh

**La Ode Muhamad Shidiq**

**NomorPokok : F611 14013**

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Skripsi

Pada tanggal 18 Januari 2021

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

**Menyetujui  
Komisi Pembimbing,**



Pembimbing I

Pembimbing II

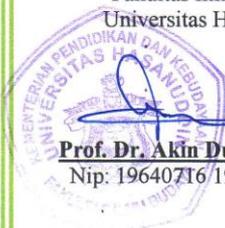
*eisa*

**Yadi Mulyadi, S.S., M.A.**  
Nip. 198003192006041003

*Hasanudin*

**Dr. Hasanuddin, M.A.**  
Nip. 196210241991031001

Dekan,  
Fakultas Ilmu Budaya  
Universitas Hasanuddin



**Prof. Dr. Akin Duli, M.A.**  
Nip: 19640716/1991 03 1010

Ketua Departemen Arkeologi,  
Fakultas Ilmu Budaya  
Universitas Hasanuddin

*Rosmawati*

**Dr. Rosmawati, M.Si.**  
Nip. 197205022005012002

## LEMBAR PENERIMAAN

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**FAKULTAS ILMU BUDAYA**

Pada hari ini Senin, 18 Januari 2021 Panitia Ujian Skripsi menerima dengan baik skripsi yang berjudul:

**BENTUK POLA SEBARAN KOMPONEN PERMUKIMAN DALAM  
KAWASAN BENTENG KOTA MUNA**

Yang diajukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana Sastra pada Departemen Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin.

25 Januari 2021

**Panitia Ujian Skripsi:**

- |                            |               |       |
|----------------------------|---------------|-------|
| 1. Yadi Mulyadi, S.S. M.A. | Ketua         | ..... |
| 2. Dr. Hasanuddin, M.A.    | Sekretaris    | ..... |
| 3. Dr. Rosmawati, M.Si     | Penguji I     | ..... |
| 4. Yusriana, S.S., M.A.    | Penguji II    | ..... |
| 5. Yadi Mulyadi, S.S. M.A. | Pembimbing I  | ..... |
| 6. Dr. Hasanuddin, M.A.    | Pembimbing II | ..... |

# LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama : LA ODE MUHAMAD SHIDIQ**

**NIM : F611 14 013**

**Departemen : ARKEOLOGI**

**Judul : BENTUK POLA SEBARAN KOMPONEN PERMUKIMAN  
DALAM KAWASAN BENTENG KOTA MUNA**

Menyatakan bahwa isi skripsi ini adalah hasil penelitian sendiri. Jika di kemudian hari ternyata ditemukan Plagiarisme, maka saya bersedia mendapat sanksi sesuai hukum yang berlaku dan saya akan bertanggung jawab secara pribadi tanpa melibatkan pembimbing dan penguji.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan tanpa paksaan ataupun tekanan dari pihak lain.

Makassar, 18 Januari 2021



**LA ODE MUHAMAD SHIDIQ**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah upaya penulis memenuhi salah satu syarat ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana Sastra pada Departemen Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin. Ada berbagai rintangan yang penulis hadapi dalam upaya penyelesaian tugas tersebut tetapi dengan ketekunan dan kerja keras yang disertai niat, akhirnya penulisan skripsi ini dapat diselesaikan pada waktu yang direncanakan.

Penulis menyadari terdapat berbagai kekurangan dalam skripsi tersebut, sebagai akibat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Sehubungan dengan hal ini, penulis selalu membuka diri untuk menerima koreksi atau kritik yang membangun dari berbagai pihak sebagai upaya penyempurnaan skripsi ini. Koreksi atau kritik tersebut tidak saja berguna untuk memperbaiki karya tulis ini tetapi juga berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan yang penulis geluti selama ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah mendapat sangat banyak bantuan, dorongan semangat, dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, selayaknyalah pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Prof. Dr. Hj. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin.

2. Prof. Dr. Akin Duli M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Budaya Univeistas Hasanuddin.
3. Ketua dan Sekretaris Departemen Arkeologi masing-masing Dr. Rosmawati, S.S., M.Si. dan Yusriana, S.S., M.A.
4. Yadi Mulyadi, S.S., M.A. selaku pembimbing I sekaligus Penasehat Akademik (PA) dan Dr. Hasanuddin M.A. sebagai pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat dirampungkan.
5. Dr. Anwar Thosibo, M. Hum., Dr. Erni Erawati, M.Si., Drs. Iwan Sumantri, M.A., M.Si., Supriadi, S.S., M.A., Dr. Khadijah Thahir Muda, M.Si., Nur Ihsan D, S.S., M.A., Asmunandar, S.S., M.A., M. Bahar Akkase Teng, Lcp, M.Hum., Dr. Muhlis Hadrawi, M.Hum., Dr. Eng Ilham Alimuddin S.T, M.Gis., Ir. H. Djamaluddin, MT. yang telah membimbing penulis menekuni berbagai mata kuliah dari awal hingga akhir pendidikan di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin.
6. Terima kasih untuk Bapak Syarifuddin Dg. Limpo yang telah banyak membantu dalam pengurusan berkas selama berakademik di Departemen Arkeologi.
7. Kepada kak Iswadi, Kak Chalid, Kak Isbah, Kak Asten, Kak Meti, Kak Afdal, Kak Arman, Kak Wiwin serta kakak-kakak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu-satu, ucapkan banyak terima kasih atas bimbingan dan perhatiannya selama penulis menjalani proses belajar.

8. Kepada kawan-kawan Tan Malaka 2014 dan Pallawa 2017 terima kasih atas perjuangan selama berproses di KMFIB-Unhas.
9. Kepada Kak Winda, Kak Rian, Kak Claren, Adi Brewok, Irene, Nona, Wilda, Akram, Joe, Haikal, Ulfa, Ecce, Acca, Chae, Jhae, Cica, Mas Akram, Ai, Aoi, Rahma, Didi, Nadia, Fahmi, Chandra, Aul, Illo, Bena, dan Jeje, penulis ucapkan banyak terima kasih telah mengisi keseharian penulis selama berorganisasi.
10. Kepada Keluarga Mahasiswa Arkeologi (KAISAR FIB UH) Rock Art 2009, Tsulus 2010, Arrow 2011, Bunker 2012, Kajokkenmoddinger 2013, Pillbox 2015, Landbridge 2016, Sandeq 2017, Pottery 2018, dan Bastion 2019, yang telah memberikan bantuan yang tulus kepada penulis selama ini.
11. Tim ugal-ugalan Una, Akbar, Waiz, Kiramin, Wa Ode Marsela, Hafis dan Yasir terima kasih telah meluangkan waktu dan keringatnya selama penulis penelitian.
12. Kepada bapak La Ode Uhu sekeluarga penulis ucapkan terima kasih telah diperbolehkan tinggal di rumah bapak selama pengumpulan data di lapangan.
13. Saudara-Saudara seperjuangan angkatan 2014, Ade (Syarafat Azis), Ali (Ali Akbar Gani), Alip (Alip Ramadhan), Ardi (Ardhi Ramadhan), Ari (Abdul Giffari Usman), Arung (Aisyah Arung Qalam), Bambang (Sirajuddin), Erna (Erna Sari Kurata), Fatima (Sitti Fatimah Karti), Fian (Afriansyah), Halida (Halida Husein), Hezron (Hezron Dwi Putra), Ima (Nur Ahlina Khusaima), Mullis (Mukhlis Tri Pusyaka), Anggraini (Annisa Anggraini), Adho (Akil

Ridho), Pia (Nur Helfiah), Rezky (Rezky Maharani M), Riri LL (Muhammad Ridwan), Riri (Sri Rafika), Saril (Syahril Ramadhan), Nja (Annisa Senja Rucita), Sukma (Sukmawati), Tamar (Mukhtamar Hussein), Amma (Taufik Kurniawan), Tina (Rima Suhartina), Toi (Agus Hendra), Wahida (Wahida Atika Hasanah), Wilda (Wilda Amin), Wike (Wike Marlinda Triwahyuni), Yoga (Kibagus Maulana Prayoga), dan sahabat Dwarapala Mba Wulan (Oktabriyanti Ayu Wulan Sari), saya tuturkan terima kasih atas bantuan, pengorbanan, senda gurau pengetahuan, dan nilai kebersamaan yang penulis peroleh dari kalian.

14. Kepada Esti Hasrawati (Esti), Jumra Alianto Ode (Joe), Adi Pranata Sopyan (Butet), La Ode Muhammad Alfian Sumanto Owo (Aphang), dan Wa Ode Imra'ah Saliymah (Salyma) penulis ucapkan banyak terima kasih telah member dukungan dan bimbingan selama ini.

15. Kedua orang tua tercinta La Ode Hayaru dan Wa Ode Asopu telah mengasuh, membimbing, dan berdoa demi tercapainya cita-cita penulis

Semoga segala bantuan yang penulis terima dan berbagai pihak tersebut mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Pengasih. Semoga pula karya ini dapat diterima sebagai sumbangan pikiran penulis untuk pembangunan bangsa khususnya pada aspek pembinaan dan pengembangan ilmu arkeologi.

Makassar, November 2020

La Ode Muhamad Shidiq

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN .....	iii
LEMBAR PENERIMAAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
Daftar Gambar .....	xv
Daftar Tabel.....	xvi
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Permasalahan.....	9
1.3 Tujuan Dan Manfaat.....	11
1.3.1 Tujuan .....	11
1.3.2 Manfaat.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Arkeologi Pemukiman .....	12
2.1.1 Asal-mula dan Perkebangannya .....	12
2.1.2 Beberapa Paradigma Sinkronis dalam Arkeologi Pemukiman .....	17
2.1.3 Beberapa Paradigma Diakronis dalam Arkeologi Pemukiman .....	23
2.2 Pola Permukiman dalam Arkeologi .....	31
2.3 Profil Wilayah Penelitian .....	39
2.3.1. Letak Geografi .....	39
2.3.2. Keadaan Iklim dan Curah Hujan .....	41
2.3.3. Geologi dan Geomorfologi .....	43

2.3.4. Lingkungan dan Mata Pencaharian .....	44
2.4 Sejarah Singkat.....	46
BAB III METODE PENELITIAN.....	58
3.1 Pengumpulan Data.....	58
3.1.1 Tinjauan Pustaka .....	58
3.1.2 Survei .....	59
3.1.3 Wawancara .....	59
3.2 Pengolahan Data .....	59
3.3 Penafsiran Data .....	61
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	62
4.1 Deskripsi Objek.....	62
4.1.1 Kediaman Raja-raja Muna .....	62
4.1.2 Kompleks Makam Kapitalao .....	63
4.1.3 Makam Sangia Kobangkuduno .....	64
4.1.4 Masjid Pertama (Lokus) dan Makam Omputo Sangia .....	65
4.1.5 Umpak Bekas Pengadilan .....	67
4.1.6 Batu Pelantikan .....	67
4.1.7 Tempat Bhonto Bhalano dan Kapitalao.....	69
4.1.8 Masjid Kedua.....	69
4.1.9 Makam Kapita Lohia.....	70
4.1.10Kediaman La Ode Rere (Lokus).....	71
4.1.11Kompleks Makam Sarano Wuna (kabangka) .....	72
4.1.12Makam Sangia Laghada.....	73
4.1.13Makam Sangia Kaindea .....	74
4.1.14Makam La Eli .....	75
4.1.15Kediaman Bhonto Bhalano Lawa.....	75
4.1.16Sumur.....	78
4.1.17Makam Bhonto Bhalano Lade Bio .....	78
4.1.18Kediaman Sangia dan Makam Sangia Latugho .....	79
4.1.19Struktur Benteng Kobangkuduno .....	80
4.1.20Struktur Benteng Sangia Latugho.....	82

4.2	Sebaran keramik dan gerabah.....	84
BAB V POLA SEBARAN KOMPONEN PERMUKIMAN KAWASAN BENTENG KOTA MUNA ..		88
5.1	Pola Sebaran Komponen Pemukiman Kota Muna.....	88
5.1.1	Pola Sebaran Ruang Pemerintahan .....	89
5.1.2	Pola Sebaran Ruang Religi.....	91
5.1.3	Pola Sebaran Ruang Sakral .....	93
5.1.4	Pola Sebaran Ruang Hunian .....	95
5.1.5	Pola Sebaran Ruang Penguburan .....	97
5.1.6	Pola Sebaran Kawasan Permukiman Benteng Kota Muna .....	99
BAB VI PENUTUP .....		102
6.1	Kesimpulan.....	102
6.2	Saran .....	103
DAFTAR PUSTAKA .....		104

## Daftar Foto

Foto 1: Umpak (1) istana Raja-raja Muna dari arah timur.....	63
Foto 2: Umpak (2) istana Raja-raja Muna dari arah barat .....	63
Foto 3: Kompleks Makam Kapitalao .....	64
Foto 4: Kompleks makam Kapitalao .....	64
Foto 5: Kompleks makam Kapitalao .....	64
Foto 6: Nisan Makam Sangia Kobangkuduno .....	65
Foto 7: Struktur Makam Sangia Kobangkuduno .....	65
Foto 8: Masjid Pertama (Lokus).....	66
Foto 9: Masjid Pertama (Lokus) dan Struktur Makam Omputo Sangia.....	66
Foto 10: Kompleks Makam Omputo Sangia .....	66
Foto 11: Kompleks Makam Omputo Sangia .....	66
Foto 12: Struktur Makam Omputo Sangia .....	66
Foto 13: Struktur Makam Omputo Sangia .....	66
Foto 14: Umpak Pengadilan .....	67
Foto 15: Umpak Pengadilan .....	67
Foto 16: Struktur (1) Batu Pelantikan .....	68
Foto 17: Struktur (2) Batu Pelantikan .....	68
Foto 18: Batu Pelantikan .....	68
Foto 19: Tempat para Bhonto Bhalano dan Kapitalao (Lokus) .....	69
Foto 20: Masjid Kedua.....	70
Foto 21: Makam Kapita Lohia .....	71
Foto 22: Struktur Makam Kapita Lohia .....	71
Foto 23: Kediaman La Ode Rere (Lokus) .....	72
Foto 24: Kompleks Makam Sarano Wuna (Kabangka) .....	73
Foto 25: Kompleks Makam Sarano Wuna (Kabangka) .....	73
Foto 26: Struktur Luar Makam Sangia La Ghada.....	74
Foto 27: Makam Sangia La Ghada.....	74
Foto 28: Makam Sangia Kaindea .....	74
Foto 29: Struktur Makam Sangia Kaindea .....	74
Foto 30: Makam La Eli .....	75
Foto 31: Struktur Makam La Eli .....	75
Foto 32: Struktur Makam Bonto Balano Lawa.....	76
Foto 33: Makam Bonto Balano Lawa .....	76
Foto 34: Kantinu (1).....	77
Foto 35: Kantinu (2).....	77
Foto 36: Makam Tua.....	77
Foto 37: Makam Bhonto Bhalano Lade Bio.....	78
Foto 38: Makam Tua.....	78
Foto 39: Lokasi Makam Bonto Balano Lade Bio .....	79
Foto 40: Umpak Kediaman Sangia Latugho .....	80

Foto 41: Makam Sangia Latugho .....	80
Foto 42: Struktur Benteng Kobang kuduno .....	81
Foto 43: Struktur Benteng Kobang kuduno .....	81
Foto 44: Struktur Benteng Sangia Latugho .....	82
Foto 45: Struktur Benteng Sangia Latugho .....	83
Foto 46: Keramik (1).....	85
Foto 47: Keramik (2).....	85
Foto 48: Keramik (3).....	85
Foto 49: Keramik (4).....	85
Foto 50: Gerabah (5) .....	85
Foto 51: Keramik dan Gerabah (6).....	85
Foto 52: Gerabah (7) .....	86
Foto 53: Keramik Gerabah (8) .....	86
Foto 54: Keramik (9).....	86

## Daftar Gambar

Gambar 1: Peta Administrasi Kabupaten Muna .....	40
Gambar 2 Peta Ruang Pemerintahan .....	89
Gambar 4 Hasil Statistik Analisis Tetangga Terdekat Ruang Pemerintahan .....	90
Gambar 5 Peta Ruang Religi .....	91
Gambar 7 Hasil Statistik Analisis Tetangga Terdekat Ruang Religi .....	92
Gambar 8 Peta Ruang Sakral .....	93
Gambar 10 Hasil Statistik Analisis Tetangga Terdekat Ruang Sakral .....	94
Gambar 11 Peta Ruang Hunian .....	95
Gambar 13 Hasil Statistik Analisis Tetangga Terdekat Ruang Hunian .....	96
Gambar 14 Peta Ruang Penguburan.....	97
Gambar 16 Statistik Analisis Tetangga Terdekat Ruang Penguburan .....	98
Gambar 17 Peta Sebaran Situs Benteng Kota Muna .....	99
Gambar 19 Hasil Statistik Analisis Tetangga Terdekat Kawasan Permukiman Benteng Kota Muna .....	100

## Daftar Tabel

Tabel 1 Luas Wilayah Kabupaten Muna Menurut Klasifikasi Ketinggian, 2015 .	41
Tabel 2 Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Muna, 2015.....	42
Tabel 3 Luas Wilayah Kabupaten Muna Menurut Kecamatan, 2019 .....	45
Tabel 4 Nama-nama Raja Muna .....	51
Tabel 5 Nama-nama Kampung .....	53
Tabel 6 Objek yang diidentifikasi .....	83
Tabel 7 Jenis Keramik.....	86

## ABSTRAK

### **La Ode Muhamad Shidiq. “BENTUK POLA SEBARAN KOMPONEN PERMUKIMAN DALAM KAWASAN BENTENG KOTA MUNA”**

Benteng Kota Muna merupakan pusat pemerintahan dari Kerajaan Muna yang terletak di Unit Pemukiman (UP) Kota Muna Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna. Selain sebagai pusat pemerintahan, kawasan Benteng Kota Muna juga dijadikan sebagai tempat bermukim bagi pejabat pemerintahan kerajaan serta kaum-kaum bangsawaan pada masanya. Sebagai tempat bermukim, tentunya masyarakat membutuhkan fasilitas-fasilitas yang kemudian akan menunjang keberlangsungan hidup bagi kelompoknya.

Kawasan Permukiman Benteng Kota Muna dipilih sebagai objek kajian dalam penelitian ini untuk melihat apa saja komponen permukiman serta bagaimana pola sebaran permukiman dalam kawasan Benteng Kota Muna. Untuk menjawab pertanyaan tersebut digunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif serta menggunakan metode analisis tetangga terdekat (*nearest neighbor analysis*).

Hasil perhitungan menggunakan analisis tetangga terdekat, secara keseluruhan pola sebaran permukiman dalam kawasan Benteng Kota Muna dengan derajat persebaran 0.476265 memperlihatkan bentuk pola berkelompok sedangkan pola sebaran komponen permukiman berdasarkan fungsinya memperlihatkan bentuk pola yang berbeda-beda. Pada ruang pemerintahan dengan derajat persebaran 0.115511 memperlihatkan pola berkelompok (*clustered*), pada ruang religi dengan derajat persebaran 0.521315 memperlihatkan pola acak (*random*), pada ruang sakral dengan derajat persebaran 0.032683 memperlihatkan pola berkelompok (*clustered*), pada ruang hunian dengan derajat persebaran 0.844662 memperlihatkan pola acak (*random*), sedangkan pada ruang penguburan dengan derajat persebaran 0.786721 memperlihatkan pola acak (*random*).

Kata Kunci : Benteng Kota Muna, Pusat Pemerintahan, Komponen Permukiman, Pola Sebaran Permukiman.

## **ABSTRACT**

### **La Ode Muhamad Shidiq. "THE SHAPE OF THE DISTRIBUTION PATTERNS OF SETTLEMENT COMPONENTS IN THE MUNA CITY FORTRESS AREA"**

Muna City Fort is the center of government of the Muna kingdom which is located in the Muna City Residential Unit (UP), Tongkuno District, Muna Regency. Apart from being the center of government, the Muna City Fortress area was also used as a residence for royal government officials as well as for the nobility of his time. As a place to live, of course a community needs facilities which will then support the survival of the group.

The Muna City Fortress Settlement Area was chosen as the object in this study to see what the settlement components are and how the settlement distribution patterns in the Muna City Fortress area. To answer these questions, this study used a descriptive research method and using the nearest neighbor analysis method.

From the results of calculations using the nearest neighbor analysis, the overall distribution pattern of settlements in the Muna City Fortress area with a distribution degree of 0.476265 shows a group pattern, while the distribution pattern of settlement components based on their function shows different forms of patterns. In government rooms with a distribution degree of 0.115511 shows a clustered pattern, in religious spaces with a degree of distribution of 0.521315 shows a random pattern, in sacred spaces with a degree of distribution of 0.032683 shows a clustered pattern, in residential spaces with a degree of distribution of 0.844662 shows a random pattern, while in the burial room with a degree of spread of 0.786721 shows a random pattern.

**Keywords:** Muna City Fortress, Government Center, Settlement Components, SettlementDistributionPatterns.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Arkeologi Ruang, merupakan salah satu studi khusus dalam bidang arkeologi, pada pokoknya lebih menitikberatkan perhatian pada pengkajian dimensi ruang (*spatial*) dari benda dan situs arkeologi daripada pengkajian atas dimensi bentuk (*formal*) dan dimensi waktu (*temporal*). Dalam sejarah perkembangan arkeologi di berbagai bagian dunia, pengkajian khusus keruangan terhadap benda-benda arkeologi maupun situs-situs memang datang lebih kemudian daripada pengkajian atas dimensi bentuk dan waktu. Perhatian studi arkeologi ruang lebih banyak ditekankan kepada benda-benda arkeologi sebagai kumpulan atau himpunan dalam suatu satuan ruang daripada sebagai satuan-satuan benda tunggal yang berdiri sendiri (Mundardjito, 1993).

Studi terkait arkeologi ruang tidak hanya dititikberatkan pada benda arkeologi sebagai satu entitas saja (*entity*), tetapi pada sebaran (*distribution*) dari benda-benda dan situs-situs arkeologi, kemudian hubungan (*relationship*) antara benda dengan benda dan situs dengan situs, serta hubungan benda atau situs dengan lingkungan fisiknya sebagai sumber daya. Arkeologi ruang tidak hanya mengkaji hubungan lokasional atau keruangan antar artefak, tetapi juga dengan bentuk-bentuk data arkeologi lain yang diistilahkan oleh Clarke (1977: 11--7) sebagai unsur-unsur (*elements*) yang terdiri dari struktur atau

fitur (*feature*), situs (*site*), dan lingkungan fisik yang dimanfaatkan sebagai sumberdaya. Pergeseran titik berat perhatian dari entitas-entitas kepada hubungan-hubungan antara entitas-entitas seperti dinyatakan di atas merupakan pencerminan dari satu anggapan bahwa artefak tidak hanya harus dipandang sebagai objek bagi kepentingannya sendiri, akan tetapi juga sebagai perantara (*mediator*) yang menghubungkan manusia dengan aspek-aspek lain, antara lain misalnya dengan lingkungannya (Watson. 1971 :87 dalam Mundardjito, 1993).

Dalam studi kasus di Indonesia, penelitian yang bertemakan arkeologi ruang telah beberapa kali dilakukan sebelumnya. Diantaranya oleh Mundardjito dalam penelitian disertasinya (1993) “Pertimbangan Ekologi dalam Penempatan Situs Masa Hindu-Buda di daerah Yogyakarta: Kajian Arkeologi-Ruang Skala Makro”, (Kasmin, 2017) “Arkeologi Pemukiman Situs Pongka, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan”, (Hasanuddin, Permukiman di Sepanjang Daerah Aliran Sungai Biang Keke dan Calendu Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, 2009), (Ririmasse, 2007) “Ruang Sebagai Wahana Makna: *Aspek Simbolik Pola Tata Ruang dalam Rekayasa Pemukiman Kuna di Maluku*”, (Mansyur, Studi Keruangan Dalam Arkeologi, 2006) (Hasanuddin, Temuan Megalit dan Penataan Ruang Permukiman di Kabupaten Enrekang, 2011), (Saiful, 2009) “Pemukiman pada Situs Gantarang Lalang Bata Kabupaten Kepulauan Selayar”, (Savitri, 2007) “Persebaran Situs-Situs Kerajaan di Kabupaten Sopeng”, (Awat, 2002) “Perkembangan Pemukiman Situs Lakudo Kabupaten Buton Abad XI-

Pertengahan Abad XX”, (Febrianah, 2007) “Studi Pemukiman Tingkat Semi Mikro Terhadap Situs Benteng Wolio Kota Bau-Bau Sulawesi Tenggara”.

Lebih khusus berbagai penelitian dari disiplin ilmu arkeologi maupun disiplin ilmu lainnya juga pernah dilakukan di Kabupaten Muna. Salah satu objek yang pernah menjadi objek penelitian yakni kawasan Benteng Kota Muna. Dalam riwayat penelitian yang telah dikumpulkan, berikut penelitian-penelitian yang telah dilakukan di kawasan Benteng Kota Muna:

La Ode Abdul Jul Jamaan dengan Judul “Bentuk Pemukiman Pada Situs Benteng Kota Muna” dengan fokus penelitian pada kajian arkeologi pemukiman. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana bentuk adaptasi manusia masa lalu, serta mengetahui latar belakang apa saja yang memengaruhi terpilihnya Situs Benteng Kota Muna sebagai pusat pemerintahan Kerajaan Muna. Dalam penelitian tersebut Jamaan mengangkat permasalahan terkait latar belakang pemilihan Benteng Kota Wuna Sebagai pusat pemerintahan serta bagaimana bentuk pemukiman dalam situs Benteng Kota Muna. Dalam upaya menjawab pertanyaan penelitiannya Jamaan menggunakan metode analisis tingkat semi mikro (meso) serta pendekatan sejarah dan pendekatan ekologi. Hasil dari penelitian tersebut menunjukan bahwa pemilihan situs Benteng Kota Muna sebagai pusat pemerintahan dilatarbelakangi oleh berbagai faktor lingkungan, serta organisasi politik yang kemudian menjadi sebuah strategi adaptasi atas kondisi lahan yang tidak begitu mendukung untuk mencukupi berbagai kebutuhan. Sedangkan bentuk dari pemukiman Kerajaan Muna memperlihatkan bentuk segi tiga dengan

kepadatan temuan terpusat pada ruang pemerintahan. Sedangkan ruang-ruang aktivitas pemukiman terdiri atas ruang sakral, ruang religi, ruang pemerintahan, ruang pemakaman, dan ruang hunian (Jamaan, Bentuk Pemukiman Dalam Situs Benteng Kota Muna, 2012).

Joni dan Dede Prat Untarti dengan judul “Sejarah Terbentuknya Fato Ghoerano di Kerajaan Muna 1600 – 1920”. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Joni dan Dede dengan mengangkat permasalahan mengenai latar belakang dibentuknya *fato ghoerano* di kerajaan Muna, proses dibentuknya dan dampaknya terhadap Kerajaan Muna. Untuk menjawab permasalahan tersebut Joni dan Dede menggunakan pendekatan strukturalis. Pendekatan strukturalis mempelajari peristiwa dan struktur sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi, sedangkan dalam penelitiannya Joni dan Dede menggunakan metode penelitian sejarah. Menurut Helius Samsudin tata kerja metode ini adalah (1) Heuristik (teknik pengumpulan data) (2) Kritik Sumber (analisis data) (3) Interpretasi (penafsiran) (4) Historiografi (penyusunan penulisan).

Hasil akhir dari penelitian tersebut yaitu Latar belakang dibentuknya *fato ghoerano* adalah akibat penambahan jumlah penduduk disatu sisi dan perluasan wilayah disisi lain. Pertambahan jumlah penduduk menyebabkan perluasan area pemukiman dan perluasan wilayah kerajaan. Kemudian dalam rangka memperlancar jalannya pemerintahan di daerah, pada masa pemerintahan La Titakono wilayah kerajaan Muna dibagi menjadi empat 4 wilayah (*fato ghoerano*) dan tiap-tiap *ghoera* dikepalai oleh seorang *ghoera*

(kepala daerah). Jadi tiap-tiap ghoera mempunyai hak untuk mengatur sendiri daerahnya. Dengan adanya pembentukan pemerintahan *ghoera*, nampak suatu sistem pemerintahan desentralisasi dimana daerah-daerah diberi wewenang untuk mengatur rumah tangganya sendiri sehingga sangat membantu tugas dari raja Muna dalam menjalankan pemerintahan (Joni & Untarti, Volume 4 No. 2, April 2019).

Sitti Hardianti Sindara, Abdul Rauf Suleiman dan Syahrin, “Tinggalan Arkeologis Di Situs Benteng Kota Wuna Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna”. Penelitian ini difokuskan pada kajian arkeologi ruang dengan skala semi-makro (meso), yang cakupannya lebih luas sampai pada satu situs, termasuk bangunan, jalan, artefak, dan non bangunan serta mempelajari sebaran dan hubungan lokasional antara artefak-artefak dan fitur-fitur dalam suatu situs dengan menggunakan pendekatan ekologis. Hasil analisis yang dilakukan di Situs Benteng Kota Wuna memiliki tinggalan-tinggalan arkeologis seperti Benteng Sangia Latugho, umpak rumah Raja Sangia Latugho, tempat Pelantikan Raja Wuna, tempat Kediaman Lakina/Raja Wuna, Masjid Wuna, serta makam Tua Raja-Raja Wuna. Dari beberapa tinggalan-tinggalan yang ditemukan pada Situs Benteng Kota Wuna terdapat tinggalan yang berasal dari jaman yang berbeda, hal ini memberikan gambaran bahwa umumnya tinggalan-tinggalan yang berada di Situs Benteng Kota Wuna merupakan tinggalan yang berkelanjutan, yaitu dari masa tradisi megalitik hingga ke masa Islam (Sindara, Suleiman, & Syahrin, 2019).

Asliah Zainal dengan judul, “Melacak Akar Demokrasi Dalam Sistem Kerajaan Muna Masa Lampau” tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh Zainal yaitu untuk menelusuri akar-akar demokratisasi dalam Kerajaan Muna di masa lampau yang dibatasi pada kurun abad ke-16 sampai dengan abad ke-20 M. Dengan perspektif antropologi-historis sebagai bentuk analisis untuk menentukan relasi antara satu dengan lainnya dan melakukan penafsiran atas data-data yang telah dikumpulkan tersebut untuk mendapatkan kesimpulan yang valid tentang sistem demokratisasi dalam Kerajaan Muna pada masa lampau. Studi tersebut memotret implikasi nilai-nilai demokratisasi di Kerajaan Muna pada sistem pemerintahan dan sistem kemasyarakatan yang dipengaruhi secara signifikan oleh nilai-nilai Islam (Zainal, 2016)

Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar (BPCB) “Pendataan Cagar Budaya Di Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara”. BPCB Makassar melakukan pendataan untuk mengumpulkan data-data informasi tentang sebaran tinggalan purbakala beserta situsnya dengan ruang lingkup kegiatan yang meliputi pencatatan temuan di lokasi situs, kondisi lingkungan, pengukuran dan pembuatan gambar denah lokasi, sehingga dapat diketahui bentuk, jumlah temuan, kondisi lingkungan, dan jenis situsnya. Hasil dari pendataan tersebut berupa gua dan ceruk sebanyak 14 buah, dua buah benteng, serta kawasan Kota Tua Muna meliputi dua buah struktur benteng, makam kuna dan objek batu pelantikan. Dengan kesimpulan Kawasan Kota Tua Muna terdiri dari benteng-benteng yang mungkin masih tersebar pada beberapa titik, umpak batu yang mungkin sebagai areal pemukiman raja,

Makam Raja Muna XVI, lokasi masjid tua, dan beberapa objek lainnya (Abubakar, et al., 2014).

Balai Arkeologi Makassar terkait tinggalan masa sejarah di Kabupaten Muna. Tujuan dari penelitian ini ialah menemukan dan mengidentifikasi potensi artefak dari periode sejarah di Pulau Muna serta membandingkan potensi artefak untuk membangun hipotesis awal kedudukan Pulau Muna dalam konteks dinamika sejarah kerajaan Buton (abad XVII-XVII). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk peninggalan arkeologis dari suatu peradaban di Pulau Muna dan bagaimana pusat kerajaan dan perubahan lokasional dalam konteks Kerajaan di Pulau Muna. Dalam upaya menjawab permasalahan penelitian tersebut, Balai Makassar menerapkan model kajian makro yang diorientasikan pada usaha menemukan sejumlah lokus situs dengan GPS (*Geographical Position System*) dan membuat kategorisasi artefak yang dapat menunjukkan posisinya dalam satuan budaya. Pada tahapan penelitian dilakukan dengan metode eksplorasi. Dalam tahap ini pengumpulan data menggunakan metode survei yakni melakukan pengamatan, pengidentifikasian temuan dan lingkungan, melihat potensi artefak serta menemukan data yang dapat mendukung analisis dalam penentuan fungsi situs dalam satuan makro. Dengan demikian, penelitian ini diorientasikan pada penemuan dan identifikasi situs dan artefak untuk mendeskripsikan kaitan fungsional (Balai Arkeologi Makassar, 2012).

Faisal Malik, “Struktur Ruang Kota Benteng Kerajaan Muna Kabupaten Muna, Di Pulau Muna Sulawesi Tenggara”. Penelitian yang

dilakukan oleh Malik bertujuan untuk mengetahui keberadaan peradaban Kota Benteng Kerajaan Muna, bentuk peradaban dimasa-masa kejayaannya dulu yang coba diceritakan lewat pengungkapan struktur ruang wilayah Benteng Kerajaan Muna. Penelitian tersebut difokuskan pada kajian struktur ruang dan perkembangan kerajaan Wuna, dengan menggunakan pendekatan deduktif kualitatif rasionalistik sebagai metode penelitian. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Malik menyebutkan struktur ruang Kota Benteng Kerajaan Muna yaitu struktur pelapisan ruang pertahanan dengan bentuk morfologi pulau, struktur ruang Kerajaan Kuna yang berlapis mulai dari pertahanan pesisir, darat, kampung dan masyarakat bertujuan untuk membentuk sistem pertahanan kerajaan yang kuat untuk menangkal musuh yang datang maupun menghancurkan musuh yang ingin masuk kerajaan Wuna (Malik, 2018).

Berdasarkan riwayat penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh La Ode Abdul Jul Jamaan (2012), Joni dan Dede Prat Untarti (2019), Sitti Hardianti Sindara, Abdul Rauf Suleiman dan Syahrin (2019), Asliah Zainal (2016), Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar (2014), Balai Arkeologi Makassar (2012), Faisal Malik (2018). Secara umum kajian-kajian yang dilakukan dengan kawasan Benteng Kota Muna sebagai objeknya yaitu kajian arkeologi ruang dengan menerapkan metode analisis tingkat semi mikro (meso) serta menggunakan pendekatan sejarah dan pendekatan ekologi, kajian mengenai struktur ruang dan perkembangan Kerajaan Muna, dengan menerapkan pendekatan deduktif kualitatif rasionalistik, kajian antropologis-

historis, dan penelitian yang bersifat pendataan. Melihat hal tersebut, maka penulis melakukan penelitian dengan tema arkeologi ruang yang dikhususkan pada komponen pemukiman serta bentuk pola sebaran tinggalan arkeologi pada permukiman dalam kawasan benteng Kerajaan Muna sebagai bentuk penelitian lanjutan dari penelitian-penelitian sebelumnya.

## **1.2 Permasalahan**

Istilah permukiman secara luas mempunyai arti perihal tempat tinggal, bangunan tempat tinggal, atau segala sesuatu yang berkaitan dengan tempat tinggal. Pengertian yang luas tentang istilah permukiman memberikan peluang untuk mengkaji sebagian besar data arkeologi dalam lingkup studi arkeologi permukiman (Mundardjito, 1985 dalam Mansyur 2005). Kajian tentang pola permukiman sendiri diperlukan untuk memahami secara langsung pola hunian masa lalu, dengan demikian dilakukan pengamatan terhadap perkampungan tradisional yang diperkirakan masih melanjutkan tradisi budayanya. Pola permukiman yang dimaksudkan adalah pola penataan komponen penunjang kehidupan bermasyarakat pada sebuah tempat bermukim. Pola penataan tersebut berkaitan dengan komponen-komponen yang meliputi tempat hunian, upacara, pertahanan, dan kuburan (Willey; Wasita 2002; 127 dalam Mansyur 2005).

Perkembangan sebuah permukiman dengan pola yang diperlihatkan pada dasarnya masyarakat tidak berperilaku secara acak dalam menentukan permukimannya, tetapi dalam batas-batas tertentu mengikuti aturan umum yang berlaku dalam masyarakat (Watson, 1971 dalam Mundardjito, 1995).

Pola sebaran situs merupakan wujud konkret dari pola gagasan dan pola perilaku masyarakat yang mendiami suatu permukiman mengenai penempatan, pengaturan dan penyebarannya. Pola keruangan dapat mencerminkan pola-pola aktivitas yang didasarkan atas satu atau sekumpulan pertimbangan teknologis, ekologis, perilaku sosial dan ideologis (Mansyur, *Permukiman tradisional Masyarakat Tanimbarkei*, 2005).

Permukiman digambarkan sebagai suatu tempat tinggal atau daerah, dimana penduduk berkelompok dan hidup bersama. Mereka membangun rumah-rumah, jalan-jalan dan sebagainya guna kepentingan mereka. Pada pengertian ini arti permukiman lebih banyak kearah wujud fisik, sebagai aktivitas manusia dan penduduk dalam memenuhi sebagian hidupnya terutama kebutuhan bertempat tinggal (Bintarto, R. 1979 dalam Marniati & Fajahari, 2015). Permukiman terbentuk karena adanya kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki kebutuhan akan berhuni. Permukiman yang dibentuk karena adanya sekelompok rumah tempat tinggal memiliki fasilitas-fasilitas penunjang baik fasilitas umum maupun sosial yang mendukung kegiatan bermukim dalam suatu kelompok masyarakat dengan jangka waktu yang cukup lama. Selain kegiatan bermukim dan berhuni suatu kelompok masyarakat, dalam sebuah permukiman juga terdapat kegiatan sosial kemasyarakatan yang mendukung satu sama lain di dalam kelompok masyarakat. Amos Rapoport mendefinisikan permukiman sebagai sebuah kota bukan dari segi ciri-ciri morfologis tertentu, atau bahkan kumpulan ciri-cirinya, melainkan dari segi suatu fungsi khusus yaitu menyusun sebuah

wilayah dan menciptakan ruang-ruang efektif melalui pengorganisasian sebuah daerah pedalaman yang lebih besar berdasarkan hierarki-hierarki tertentu (Wiraprama, Zakaria, & Purwantiasning, 2014).

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penelitian ini akan diberikan batasan-batasan dalam bentuk pertanyaan untuk memberikan kemudahan dalam penelitian terkait komponen pemukiman dan sebaran tinggalan arkeologi yang terdapat pada lingkungan benteng Kerajaan Muna. Adapun pertanyaannya yaitu :

1. Komponen permukiman apa saja yang terdapat dalam kawasan Benteng Kota Muna?
2. Bagaimana pola sebaran komponen permukiman dalam kawasan Benteng Kota Muna?

### **1.3 Tujuan Dan Manfaat**

#### **1.3.1 Tujuan**

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apa saja komponen permukiman yang terdapat dalam kawasan Benteng Kota Muna serta bagaimana pola sebaran komponen permukimannya.

#### **1.3.2 Manfaat**

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa gambaran mengenai bentuk pola sebaran dan komponen permukiman dalam kawasan benteng Kota Muna.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Arkeologi Pemukiman**

##### **2.1.1 Asal-mula dan Perkebangannya**

Dinamika dan perubahan masyarakat di masa lampau dapat diketahui antara lain dari pola pemukimannya. Sebab suatu pola pemukiman (*settlement pattern*) pada dasarnya merupakan pengejawantahan (ekspresi) dari konsepsi manusia mengenai ruang, serta hasil upayanya untuk mengubah dan memanfaatkan lingkungan fisik berdasarkan atas pandangan dan pengetahuan yang mereka miliki mengenai lingkungan tersebut. Dalam perkembangannya, studi pola pemukiman dalam arkeologi tumbuh dari dua tradisi yang berbeda. Yang pertama tumbuh dan berkembang pesat di Amerika Serikat, sedangkan yang lain muncul dan berkembang dengan lambat di Inggris (Parsons, 1972 dalam). Arkeologi pemukiman di Amerika Serikat muncul dan dikembangkan oleh ahli-ahli arkeologi dari Columbia University di kota New York, yang dipelopori oleh Gordon Willey, seorang ahli dalam arkeologi Amerika Selatan.

Ahli lain dari Amerika yang juga berbicara mengenai pertumbuhan pemukiman adalah C. Mindelff. Dalam serangkaian penelitiannya di kawasan Southwest (Barat Daya) di Amerika Serikat, Mindelff mencoba menggunakan analogi etnografi untuk memberikan

sebuah tafsir tentang pertumbuhan pemukiman kuno di kawasan tersebut. Selain itu Mindelff juga mengemukakan suatu metode untuk merekonstruksi kronologi ditempatinya suatu lokasi serta komposisi pemukimannya berdasarkan atas tinggalan-tinggalan arkeologis yang ada. Selain C. Mindelff, Julian Steward yang merupakan ahli arkeologi dari Columbia University, terkenal karena teori evolusi multilinearnya serta studi *cultural ecology*nya mempublikasikan dua hasil penelitiannya tentang masyarakat Indian di daerah Southwest, Amerika Serikat (Steward, 1937; 1938 dalam). Dalam dua karya penting Steward mencoba memanfaatkan data tentang pola-pola pemukiman pada tingkat komunitas dan kawasan untuk mengungkapkan berbagai proses perkembangan yang pernah terjadi pada masa pra-sejarah. Dua karya tersebut mendorong lahirnya dua proyek besar dalam penelitian arkeologi di Amerika di tahun 40-an. Yakni proyek Lembah Mississippi Bawah dan proyek Lembah Viru. Dalam proyek Lembah Viru Steward menyarankan Willey yang merupakan pimpinan tim agar lebih memperhatikan bentuk-bentuk, setting, hubungan-hubungan *spatial* antar situs serta berbagai implikasi terhadap kehidupan masyarakat yang membangun pemukiman tersebut.

Dua konsep arkeologis yang sangat penting dalam penelitian tersebut adalah “tipe situs” (*site type*) dan “konfigurasi pemukiman” (*settlement configuration*). Konsep pertama menunjuk pada jenis situs

yang ditentukan atas dasar kegiatan-kegiatan tertentu yang dilakukan di dalamnya, serta fungsi pra-sejarahnya. Situs-situs yang berbeda fungsinya ternyata tidak begitu saja tersebar acak-acakan dalam suatu kawasan, tetapi mengikuti suatu pola atau konfigurasi tertentu, dan inilah yang dikatakan sebagai “konfigurasi pemukiman” atau pola pemukiman. Jadi pola pemukiman tidak lain adalah *“the distribution of different kinds of sites with respect to each other and the natural environment”* (Plog, 1974:72 dalam). Willey kemudian mendefinisikan pola pemukiman ditinjau dari perspektif arkeologi sebagai *“the way in which man disposed himself over the landscape on which he lived. It refers to dwellings, to their arrangements and to the nature and disposition of other buildings pertaining to community life”* (1953:1).

Oleh seorang ahli antropologi budaya, Evon Z. Vogt (1956), konsep itu dioperasionalkan lebih jauh, sehingga studi tentang pola pemukiman pada dasarnya mencakup usaha untuk mendeskripsikan butir-butir berikut:

- a. *“the nature of individual domestic housetype or types”*  
(hakekat dari suatu atau beberapa tipe rumah tinggal)
- b. *“the spatial arrangement of the domestic housetypes with respect to one another within the village or community unit”*  
(pengaturan spatial tipe-tipe rumah tinggal ini dalam hubungan satu dengan lain, dalam suatu unit desa atau komunitas)

- c. *“the relationship of domestic housetype to other spatial architectural features”* (relasi antara tipe-tipe rumah tinggal dengan bentuk-bentuk arsitektural lainnya)
- d. *“the overall village or community plan”* (tata letak atau keseluruhan pola desa atau komunitas)
- e. *“the spatial relationship of the villages communities to one another over as large an area as feasible”* (hubungan-hubungan spatial antara suatu desa atau komunitas dengan desa atau komunitas yang lain di suatu kawasan dengan luas sefisibel mungkin).

Selain memuat kaian-kajian tentang pola pemukiman, beberapa tulisan dalam *Prehistoric Settlement* di atas, memperlihatkan upaya beberapa pakar arkeologi untuk terus-menerus mengembangkan konsep-konsep mereka. Ahli arkeologi seperti Willey dan Sanders berusaha mengembangkan lebih lanjut konsep “pola pemukiman” bagi studi arkeologi. Sanders (1956) misalnya memperkenalkan konsep *sybiotic region* serta membuat perbedaan antara *community settlement pattern* (pola pemukiman komunitas) dan *zonal settlement pattern* (pola pemukiman wilayah), sedang Willey membeberkan manfaat pengembangan studi pola pemukiman bagi arkeologi dan etnologi, serta implikasi studi semacam itu terhadap data yang harus dikumpulkan oleh seorang peneliti arkeologi.

Dalam kajian-kajian arkeologis yang baru menuntut adanya pemetaan yang lebih jelas antara *settlement pattern* dan *settlement system*. Misalnya Winters, dia berupaya memformulasikan kembali konsep-konsep tersebut untuk memenuhi kebutuhan analisisnya. Bagi dia, “pola pemukiman” kemudian adalah “the geographic and physiographic relationship of a contemporaneous group of sites within a single culture” Sedang “sistem pemukiman” adalah “*the functional relationships among the sites contained within the settlement pattern, the functional relationship among a contemporaneous group of sites within a single culture*” (Parsons, 1972: 132).

Menurut Fred T. Plog, analisis pola pemukiman tidak cukup mampu untuk menghasilkan gambar yang lebih dinamis tentang kebudayaan dan masyarakat kuno yang diteliti. Oleh karena itu Plog mengusulkan suatu pendekatan baru, yakni pendekatan “locational”. Plog (1974) menawarkan pendekatan ini karena dia melihat adanya beberapa kendala yang sulit dihadapi jika seorang ahli arkeologi secara ketat berusaha menjelaskan dan memahami pola pemukiman kuno yang dipelajarinya dengan menggunakan konsep pola pemukiman. Sebagai ganti dari dari konsep tipe situs, Plog mengemukakan beberapa konsep baru seperti “kepadatan” (*density*), “kerataan” (*evenness*), “penumpukan” (*agglomeration*), “hirarki”

(*hierarchy*), “differensiasi” (*differentiation*), “integrasi” (*integration*), dan “pengelompokan” (*clustering*).

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh J.N.Hill (1968) atas pemukiman kuno orang Indian Pueblo di situs Broken K. di Negara bagian Arizona bagian timur bertujuan untuk mendeskripsikan struktur sosial dan organisasi komunitas pemukiman kuno di Broken K. Salah satu asumsi arkeologis yang penting dalam studi ini adalah bahwa perilaku-perilaku masyarakat Pueblo yang berpola, secara arkeologis akan tercerminkan dalam pola persebaran artefak-artefak yang ditemukan (Ahimsa-Putra, *Arkeologi Pemukiman: Asal-Mula dan perkembangannya*, 1997).

### **2.1.2 Beberapa Paradigma Sinkronis dalam Arkeologi Pemukiman**

Dalam tulisan yang berjudul “Beberapa Paradigma Sinkronis Dalam Pemukiman” Heddy Shri Ahimsa Putra menguraikan beberapa paradigma sinkronis yang relatif dominan dalam arkeologi pemukiman dan hasil analisis yang telah dicapai. Kurangnya pengetahuan mengenai kerangka teori atau paradigma serta permasalahan yang telah dikembangkan dalam arkeologi pemukiman menjadi alasan Heddy dalam menulis artikel ini. Di luar dari hal tersebut, alasan lain yang mendorong Heddy dalam membuat artikel ini ialah agar dapat mengetahui perkembangan pemikiran dan konsep-konsep analisis dalam studi arkeologi tentang pola pemukiman, agar

dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing paradigma, sehingga dapat mengembangkan bidang studi arkeologi pemukiman dengan landasan teoritis yang kokoh, agar terhindar dari kesalahan teoritis dan metodologis yang tidak perlu, serta dapat mengembangkan suatu bidang kajian arkeologis yang lebih multidisipiner. Dalam artikel ini, beberapa paradigma yang akan diuraikan antara lain: paradigma Ekologi; paradigma Analisis Lokasi; dan paradigma Jangkauan Situs.

#### **2.1.2.1 Paradigma Ekologi**

Dari tiga paradigma yang telah disebutkan di atas, paradigma ekologi merupakan paradigma pertama muncul dalam kajian arkeologi pemukiman. Salah satu ciri dari paradigma tersebut yakni lingkungan fisik merupakan faktor penentu letak dan pola suatu pemukiman. Beberapa peneliti yang menggunakan paradigma ekologi antara lain: David Thomas dan Robert Bettinger dalam penelitian tentang pola pemukiman orang Indian di lembah Sungai Reese di negara bagian Nevada bagian tengah dan pola pemukiman orang Indian Maya di Amerika Tengah. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di lembah Sungai Reese ditemukan bahwa pemukiman tersebut merupakan *bimodal settlement pattern* atau pola pemukiman dua macam, yaitu pemukiman musim panas dan pemukiman musim dingin. Menurut Thomas, faktor

yang menentuka letak suatu pemukiman musim dingin orang Shoshoni dimasa lalu antara lain: jarak air, jarak ke *ecotone* (daerah transisi), tingkat elevasi di atas tanah lembah, dan tingkat kemiringan. Untuk memudahkan proses pengujian arkeologi, Thomas memanfaatkan foto udara dan menerapkan metode pengambilan sampel atas daerah-daerah yang dianggap besar kemungkinan memiliki bekas-bekas pemukiman. Studi yang dilakukan oleh Thomas termasuk cara studi yang baru dalam arkeologi, sebab dengan menggunakan komputer, Thomas membangun sebuah model simulasi pola persebaran artefak-artefak di kawasan Sungai Reese.

#### **2.1.2.2 Paradigma analisis lokasi**

Paradigma analisis lokasi memanfaatkan tidak hanya data ekologi dan arkeologi tetapi juga data etnografi yang didapatkan dari studi epografi. pendekatan analisis lokasi ini menggabungkan data “etic” dan data “emic”, metode ini digunakan oleh Joyce Marcus (1973) dalam studinya mengenai pola pemukiman orang-orang Indian Maya di masa lampau. Kebudayaan Maya Klasik yang ada di semenanjung Yucatan Meksiko merupakan kebudayaan yang sering diteliti secara intensif oleh ahli-ahli arkelogi Amerika Serikat. Pola pemukiman orang Maya pernah dikaji menggunakan pendekatan ekologi oleh William Bullard (1960) dan William

Rathje (1971), namun hasil dari penelitian tersebut dianggap kurang memuaskan. Maka dari itu Marcus mencoba membangun sebuah model baru yang diharapkan mampu menjelaskan dan mengungkapkan pola pemukiman orang Maya. Pendekatan ini yang kemudian disebut pendekatan analisis lokasi. Menurut Marcus, kawasan pemukiman orang Maya pada periode klasik dipimpin oleh empat ibukota regional yang dipilih dari beberapa pusat yang besar. Dari kajian yang telah dilakukan tersebut tampak jelas bahwa Marcus berhasil menggunakan sebuah model baru tentang pola pemukiman orang Maya. Hal tersebut membuat penjelasan Marcus lebih meyakinkan dari pada yang dikemukakan oleh Bullard dan Rathje yang menggunakan pendekatan ekologi.

### **2.1.2.3 Paradigma jangkauan situs**

Paradigma jangkauan situs memiliki tujuan mempelajari relasi antara teknologi dan sumber-sumber alam yang ada dalam jangkauan ekonomis (*economic range*) dari masing-masing situs. Paradigma ini juga memiliki prinsip yakni: jika segala sesuatu sama, maka makin jauh jarak suatu sumber daya dari sebuah situs, makin kurang menariklah sumber tersebut. Konsep “catchment” atau “jangkauan” diterapkan oleh Vita-Finzi dan Higgs (1970) dalam penelitian mereka di situs-situs Paleolithic dan awal Neolithic di Laut

Tengah bagian bagian timur. Vita-Finzi dan Higgs membatasi wilayah sekitar situs dengan radius kira-kira 5 kilometer dengan dugaan sebagian besar sumber daya yang digunakan dalam situs-situs ini akan berada dalam batasan tersebut, hal ini yang kemudian disebut “catchment area” (wilayah jangkauan).

Dari usaha yang telah dilakukan oleh Vita-Finzi dan Higgs ini kemudian diikuti dan disempurnakan oleh ahli-ahli arkeologi lain. Salah satunya K.V. Flannery yang menerapkan “jangkauan situs” dalam studinya atas situs San Jose Mogote. Flannery berangkat dari data arkeologis mengenai sumber-sumber daya yang benar-benar diolah atau dimanfaatkan, baru kemudian merekonstruksi jangkauan kegiatan penduduk di situs tersebut. hal ini sedikit berbeda dengan metode yang digunakan oleh Vita-Finzi dan Higgs. Flannery menyatakan bahwa penduduk San Jose Mogote memerlukan suatu kawasan dengan radius kurang dari 2 ½ kilometer untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok pertanian mereka. Namun demikian, untuk memenuhi kebutuhan sumber daya mineral serta tanaman-tanaman musiman lainnya, serta jenis binatang dan burung tertentu dibutuhkan daerah yang lebih luas, yakni sekitar 15 kilometer. Flannery kemudian melakukan perbandingan jangkauan antara penduduk San Jose Mogote

dengan jangkauan desa-desa dari masa yang sama (masa Early Formative). Dari hasil analisis dapat dilihat bahwa pendekatan jangkauan situs dapat memberikan informasi tentang bagaimana petani-petani zaman dulu di San Jose Mokote memanfaatkan lingkungannya, kegiatan apa saja yang mereka lakukan, serta bagaimana hubungan mereka dengan petani-petani dari desa lain. Dalam hal ini faktor jangkauan situs bersama dengan faktor sosial lainnya benar-benar “menentukan” lokasi serta jarak antar desa.

Dikatakan sebagai paradigma sinkronis karena paradigma ini hanya dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan tentang letak dan pola pemukiman suatu masyarakat di masa lampau, distribusi situs-situs pemukiman, serta hubungan antar suatu kawasan pemukiman dengan lokasi sumber daya alam yang ada disekitarnya. Paradigma ekologi tampak lebih tepat digunakan untuk penelitian tentang masyarakat prasejarah yang memang sangat sedikit atau tidak meninggalkan data tertulis sama sekali, paradigma analisis lokasi lebih tepat diterapkan pada masyarakat kuno yang tulisan, karena pendekatan ini menuntut adanya data “emic” atau data budaya masyarakat yang bersangkutan, sedangkan paradigma jangkauan situs digunakan untuk mengetahui

jangkauan aktivitas sosial-ekonomi dari suatu komunitas kuno yang pernah menempati suatu situs tertentu (putra, 1997).

### **2.1.3 Beberapa Paradigma Diakronis dalam Arkeologi Pemukiman**

Kesadaran tentang makna strategis studi pola pemukiman secara arkeologis, serta upaya untuk mengatasi kelemahan model sistemik dalam studi tersebut agar arkeologi lebih mampu mengungkapkan dan menjelaskan berbagai perubahan dalam masyarakat-masyarakat kuno melalui studi pola pemukimannya, mendorong para ahli arkeologi mengembangkan berbagai paradigma baru yang lebih diakronis sifatnya. Hasil studi dari paradigma semacam ini biasanya berupa uraian tentang perubahan yang terjadi dalam masyarakat yang diteliti, prosesnya, serta berbagai macam dampaknya terhadap aspek-aspek sosial-budaya lainnya. Pada dasarnya paradigma sinkronis dan diakronis bersifat saling melengkapi, sebab suatu masyarakat atau kebudayaan tidak akan dapat di pahami aspek dinamisnya, tanpa dengan memahami aspek statisnya. Beberapa paradigma diakronis yang telah berkembang di dalamnya antara lain, paradigma biokulturasi, paradigma demografis, dan paradigma ekonomi.

#### **2.1.3.1 Paradigma Biokultural**

Analisis biokultural dalam arkeologi pernah diterapkan oleh Jane Buikstra (1977) dalam penelitiannya tentang

masyarakat prasejarah di lembah Illionis Bawah (Lower Illionis) di negara bagian Illioni, Amerika Serikat, yang merupakan masyarakat Indisan kuno dengan pola kebudayaan “Woodland”. Buikstra menggabungkan teknik-teknik penelitian dalam osteologi manusia dengan teknik-teknik penelitian arkeologi yang sudah lebih maju. Dari analisisnya atas berbagai peninggalan arkeologis dan kerangka manusia yang berhasil ditemukan, Buikstra sampai pada kesimpulan bahwa meskipun penguburan pada masa Woodland Akhir tidak banyak menyertakan benda-benda kubur yang bagus dan menarik, sebagaimana yang tampak pada hasil penggalian yang berasal dari masa Woodland Tengah, namun organisasi sosial masyarakat prasejarah Woodland, sebagaimana tercermin dari pekuburan mereka, tidak menjadi lebih sederhana atau kurang kompleks (Thomas, 1997: 314). Temuan penting dari kajian biokultural yang dikerjakan oleh Buikstra adalah fakta tentang adanya perubahan orientasi dalam pola pemukiman penduduk Woodland di masa Akhir, yakni dari orientasi ke arah kawasan tepian sungai menjadi orientasi yang mencakup daerah yang lebih luas, termasuk diantaranya daerah dataran tinggi, sebagaimana tercermin antara lain pada *Gene Pools* penduduk, yang diketahui dari analisis osteologis yang dilakukan.

### 2.1.3.2 Paradigma Demografis

Dasar dari pendekatan demografis adalah sebuah model tentang perubahan pola pertanian yang kini telah sangat dikenal, yakni model *jinniyang* dikembangkan oleh Ester Boserup (1965). Boserup mengatakan bahwa masyarakat yang masih dalam kondisi praindustri, jumlah tenaga kerja yang tersedia merupakan faktor terakhir dalam proses produksi dan tingkat perkembangan yang dicapai. Dalam situasi yang biasa, ketika dominasi dari kelompok lain tidak ada, petani baru bersedia mengubah pola pertanian mereka ke arah yang lebih intensif bilamana kepadatan penduduk telah mencapai titik kritis tertentu, yakni saat ambang batas daya dukung (*carrying capacity*) lahan yang tersedia sudah tercapai dan petani menghadapi penurunan tingkat kehidupan jika pola pertanian yang lama tetap dipertahankan. Pembentukan pemukiman dengan pola tertentu sebenarnya bersifat multi kausal. Namun, dalam perspektif demografi, perhatian diarahkan pada sebab-sebab demografisnya. Perspektif demografi dalam studi pola pemukiman tidak lain bertujuan untuk menunjukkan dan memahami keterkaitan fungsional antara pola penggunaan lahan, penambahan penduduk, dan pola pemukiman dari suatu masyarakat.

Dari model yang telah diterapkan oleh Boserup, Smith mencoba menjelaskan berbagai perubahan pola pemukiman yang menurutnya telah dipengaruhi oleh faktor-faktor demografis. Misalnya saja, perubahan-perubahan yang berhasil ditemukan oleh W.A. Ritchie dalam penelitiannya tentang masa prasejarah masyarakat Indian yang tinggal di New York (1965). Masyarakat tersebut memiliki kebudayaan Owasco, yang secara evolusionis dibedakan menjadi tiga tahap, yaitu; Owasco Awal, Tengah dan Akhir. Pada masa Owasco ini menurut Smith telah terjadi kenaikan jumlah penduduk. Bersamaan dengan itu muncul pola pertanian yang lebih intensif dan desa-desa yang lebih besar, yang juga semakin banyak jumlahnya. Selain itu ada kecenderungan baru yang tampak dalam pola desanya, yakni dari pola desa yang terbuka dan tanpa benteng di masa Owasco awal, menjadi desa-desa yang lebih tertutup pada masa Owasco tengah, yang dilengkapi dengan pagar pelindung.

Kajian Fowler (1969) mengenai kebudayaan Indian di daerah sungai Mississippi di daerah Midwest, Amerika Serikat pada masa-masa abad 7 hingga abad 10 (th.600-1000), juga memperlihatkan hal yang sama, yakni bahwa dalam periode tersebut telah terjadi kenaikan jumlah penduduk yang kemudian mendorong munculnya kawasan-kawasan

pemukiman yang lebih besar, pemukiman yang relatif tetap dengan kota-kota yang memiliki benteng. Hal ini mencerminkan adanya suatu perubahan dalam pola pemukiman, yakni dari pola desa-desa yang menyebar dan beberapa kota kecil di sana-sini, menjadi pemukiman dengan kawasan-kawasan pemukiman kecil di sekeliling kawasan pemukiman yang lebih besar.

### **2.1.3.3 Paradigma Ekonomi**

Pendekatan ini diusulkan oleh B.W. Blouet (1972), yang beranggapan bahwa pola-pola pemukiman selalu mempunyai kaitan erat dengan berbagai kegiatan ekonomi. Dasar pemikiran ini digunakan oleh Blouet untuk memahami pola-pola pemukiman dalam berbagai masyarakat di Eropa Barat. Dari penelitian yang dilakukannya Blouet menemukan adanya perkembangan evolusioner pada berbagai pola pemukiman dengan beberapa tahap yang seragam, walaupun masing-masing terjadi dalam kurun waktu yang berbeda. Pola pemukiman di Eropa Barat telah berkembang melalui enam tahap evolusi, yakni: (1) pemukiman dengan fungsi terbatas; (2) desa-desa (*villages*); (3) kota-kota kecil (*towns*); (4) pusat-pusat pembuatan (*centers of manufacturing*); (5) konurbasi (*conurbation*); (6) penyebaran (*dispersion*).

Pada tahap pertama, petani-petani subsisten umumnya tinggal dalam pemukiman yang cenderung menyebar rata agar mereka dapat memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada secara efisien. Dengan asumsi bahwa para petani kemudian akan dapat menghasilkan surplus, maka masing-masing kelompok akan mengembangkan jenis-jenis surplus yang berbeda-beda. Hal tersebut kemudian menimbulkan keinginan untuk melakukan kegiatan tukar-menukar surplus. Kegiatan pertukaran ini selanjutnya akan menghasilkan surplus kekayaan serta berbagai lowongan baru bagi pengrajin-pengrajin khusus yang menyediakan barang dan jasa di pusat pertukaran. Pusat pertukaran ini oleh Blouet disebut “desa”. Tahap ketiga, yakni munculnya kota-kota kecil yang terjadi bilaman perkembangan ekonomi terus berlangsung, dan perdagangan antar daerah meningkat dengan pesat. Daerah atau desa yang relatif sama jauhnya dengan desa-desa yang lain ini cenderung akan tumbuh menjadi pusat pertukaran, sebab produsen maupun konsumen yang datang dari berbagai desa tidak ingin pergi terlalu jauh dari desanya, karena jarak yang terlalu jauh akan membuat keuntungan ekonomis dari proses pertukaran menjadi berkurang. Desa-desa semacam inilah yang kemudian berkembang menjadi kota-kota kecil yang kemudian memberikan jasa-jasa tertentu pada desa-desa

di sekitarnya. Kota-kota semacam ini biasanya masih merupakan kota-kota kecil praindustri (Blouet, 1972).

Dalam tahap yang keempat, kota-kota kecil di atas akan berkembang menjadi “pusat-pusat pembuatan” (*centers of manufacturing*), yang salah satu cirinya adalah adanya teknologi baru yang digunakan dalam proses produksi, sehingga berbagai barang dapat dibuat secara massal. Berbagai tempat yang menjadi pusat produksi serta daerah sumber daya utama akan berubah menjadi pusat-pusat pertumbuhan dan akan menarik arus migrasi penduduk. Pada tahap ini, pola pemukiman yang bertingkat (*hierarchical*) tidak lagi tampak begitu jelas. Yang muncul kemudian adalah suatu kontinum, suatu kesinambungan, dalam pola pemukiman, di mana berbagai macam pemukiman memiliki fungsi-fungsi kekotaan (*urban function*), dan perbedaan antara pola-pola pemukiman seperti dukuh, desa, kota, dan pusat industri menjadi semakin kabur. Pada tahap pertumbuhan yang kelima muncul apa yang dinamakan Blouet “conurbation”. Pada tahap ini pusat-pusat kekotaan tumbuh menjadi pasar bagi berbagai barang. Pertumbuhan aktivitas ekonomi yang pesat dalam tahap ini membuat jumlah jasa yang ditawarkan dalam kota-kota bertambah dengan cepat, termasuk di antaranya jasa-jasa perbankan, hukum, percaloan serta konsultan teknis. Tahap

terakhir, yakni penyebaran (*dispersion*), menurut Blouet belum tampak begitu jelas pada data arkeologisnya, sehingga tidak banyak yang diuraikan tentang tahap ini, kecuali bahwa harga tanah, tenaga kerja dan biaya kemacetan yang timbul semakin tinggi, yang dibarengi dengan perkembangan teknologi komunikasi. Pada fase ini kecenderungan menyebar mulai tampak. Di sinilah muncul kemudian kota-kota satelit, yang agak menjauh dari “conurbations”. Tahap-tahap evolusi ekonomi masyarakat dan pola pemukimannya di atas tidak dianggap sebagai skema evolusi yang universal. Menurut Blouet, tahap tersebut disusun atas dasar bukti-bukti yang ada di Eropa Barat.

Paradigma-paradigma di atas dapat menghasilkan gambaran tentang masyarakat kuno yang lebih dinamis dan lebih historis. Paradigma yang pertama, yakni paradigma biokultural masih belum terasa meyakinkan kehebatannya dalam menjelaskan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Paradigma kedua, yaitu paradigma demografis, sepiantas tidak terlalu rumit, jika mengikhti model yang dikemukakan oleh Boserup, namun dalam perkembangannya kemudian model paradigma ini menjadi lebih njimet dan lengkap, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Hassan (1979). Paradigma yang ketiga, paradigma ekonomi, merupakan paradigma yang sangat

penting bagi studi pola pemukiman secara arkeologis. Sayangnya, paradigma ini menuntut data arkeologis yang lebih banyak dan analisis yang lebih rumit, karena model yang disodorkan juga lebih rumit. (Ahimsa-Putra, Beberapa Paradigma Diakronis Dalam Arkeologi Pemukiman, 1998).

## 2.2 Pola Permukiman dalam Arkeologi

Permukiman berasal dari kata mukim yang berarti penduduk tetap, tempat tinggal kediaman, daerah dan dapat pula didefinisikan sebagai kawasan. Sehingga, kata permukiman dapat didefinisikan sebagai daerah yang terdiri dari kumpulan tempat tinggal yang didiami oleh masyarakat yang bermukim di suatu tempat, akhirnya permukiman memiliki elemen-elemen fisik lainnya selain bangunan tempat tinggal seperti pasar, bangunan pendidikan, dan bangunan pemerintahan. Sehingga apabila permukiman semakin kompleks sampai terbentuk kumpulan permukiman, maka akan terlihat juga lima elemen pembentuk kota yang dimaksud Kevin Lynch yaitu elemen *path*, *edges*, *landmark*, *nodes* dan *district* (Wiraprama, Zakaria, & Purwantiasning, 2014).

Permukiman digambarkan sebagai suatu tempat tinggal atau daerah, dimana penduduk berkelompok dan hidup bersama. Mereka membangun rumah-rumah, jalan-jalan dan sebagainya guna kepentingan mereka. Pada pengertian ini arti permukiman lebih banyak kearah wujud fisik, sebagai aktivitas manusia dan penduduk dalam memenuhi sebagian hidupnya

terutama kebutuhan bertempat tinggal (Bintarto, R. 1979 dalam Marniati &Fajahari, 2015). Permukiman terbentuk karena adanya kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki kebutuhan akan berhuni. Permukiman yang dibentuk karena adanya sekelompok rumah/ tempat tinggal memiliki fasilitas-fasilitas penunjang baik fasilitas umum maupun sosial yang mendukung kegiatan bermukim dalam suatu kelompok masyarakat dengan jangka waktu yang cukup lama. Selain kegiatan bermukim dan berhuni suatu kelompok masyarakat, dalam sebuah permukiman juga terdapat kegiatan sosial kemasyarakatan yang mendukung satu sama lain di dalam kelompok masyarakat. Amos Rapoport mendefinisikan permukiman sebagai sebuah kota bukan dari segi ciri-ciri morfologis tertentu, atau bahkan kumpulan ciri-cirinya, melainkan dari segi suatu fungsi khusus yaitu menyusun sebuah wilayah dan menciptakan ruang-ruang efektif melalui pengorganisasian sebuah daerah pedalaman yang lebih besar berdasarkan hierarki-hierarki tertentu (Wiraprama, Zakaria, & Purwantiasning, 2014).

Menurut Honigmann dalam Koentjaraningrat (1990) wujud kebudayaan dibedakan atas tiga yaitu: sistem ide/gagasan/nilai/norma/peraturan, sistem sosial, dan sistem fisik. Ketiga wujud ini menjadi satu kesatuan sistem, sistem ide akan mengatur dan memberikan arah pada sistem sosial dan selanjutnya akan menghasilkan sistem fisik. Sebaliknya sistem fisik tersebut akan membentuk suatu lingkungan hidup tertentu yang makin lama makin menjatuhkan manusia dari lingkungan alaminya, sehingga bisa memengaruhi sistem sosial, bahkan

juga memengaruhi sistem idenya. Salah satu wujud fisik kebudayaan atau karya arsitektur suatu masyarakat yang paling banyak/dominan di muka bumi adalah rumah. (Runa, Armaeni, & Warnata, 2013).

Istilah permukiman secara luas mempunyai arti perihal tempat tinggal, bangunan tempat tinggal, atau segala sesuatu yang berkaitan dengan tempat tinggal. Pengertian yang luas tentang istilah permukiman memberikan peluang untuk mengkaji sebagian besar data arkeologi dalam lingkup studi arkeologi permukiman (Mundardjito, 1985 dalam Mansyur 2005). Kajian tentang pola permukiman sendiri diperlukan untuk memahami secara langsung pola hunian masa lalu, dengan demikian dilakukan pengamatan terhadap perkampungan tradisional yang diperkirakan masih melanjutkan tradisi budayanya. Pola permukiman yang dimaksudkan adalah pola penataan komponen penunjang kehidupan bermasyarakat pada sebuah tempat bermukim. Pola penataan tersebut berkaitan dengan komponen-komponen yang meliputi tempat hunian, upacara, pertahanan, dan kuburan (Willey; Wasita 2002; 127 dalam Mansyur 2005).

Perkembangan sebuah permukiman dengan pola yang diperlihatkan pada dasarnya masyarakat tidak berperilaku secara acak dalam menentukan permukimannya, tetapi dalam batas-batas tertentu mengikuti aturan umum yang berlaku dalam masyarakat (Watson, 1971 dalam Mundardjito, 1995). Pola sebaran situs merupakan wujud konkret dari pola gagasan dan pola perilaku masyarakat yang mendiami suatu permukiman mengenai penempatan, pengaturan dan penyebarannya. Pola keruangan dapat

mencerminkan pola-pola aktivitas yang didasarkan atas satu atau sekumpulan pertimbangan teknologis, ekologis, perilaku sosial dan ideologis (Mansyur, Permukiman tradisional Masyarakat Tanimbarkei, 2005).

Pola pemukiman yang merupakan perwujudan cara manusia untuk mengatur dirinya, merefleksikan aspek-aspek budaya yang semuanya saling terkait (Simanjuntak dkk. 2008: 177 dalam Marniati & Fajahari, 2015). Pengertian pola persebaran permukiman secara umum merupakan susunan sifat persebaran permukiman dan sifat hubungan antara faktor-faktor yang menentukan terjadinya sifat persebaran permukiman tersebut. Menurut Petter Hagget pola persebaran permukiman ada 3 tipe pola yaitu seragam (*uniform*), acak (*random*), mengelompok (*clustered*) (Saraswati, Subiyanto, & Wijaya, 2016). Pola permukiman merupakan tempat bermukimnya manusia dan melakukan aktivitas sehari-hari. Bentuk penyebaran permukiman dapat dilihat berdasarkan relief dan kenampakan alam pada daerah tersebut. Pola Memanjang (*linier*) Pola memanjang terbentuk mengikuti jalan, rel kereta api, pantai dan sungai. Pola tersebar (*Radial*) pola pemukiman tersebut terdapat di dataran tinggi dan atau pegunungan yang berrelief. Pola Terpusat, pola pemukiman ini membentuk unit-unit yang kecil dan menyebar, biasanya di pegunungan atau dataran tinggi. Permukiman memiliki pola tertentu dalam proses pembentukannya pola biasanya terbentuk karena ada faktor yang mempengaruhi misalnya karena topografi,

infrastruktur, jaringan jalan dan faktor-faktor penyebab lainnya (Watopa & Ritohardoyo).

Pola pemukiman dapat dianggap sebagai ekspresi dari konsepsi manusia mengenai ruang serta merupakan hasil dari upaya manusia untuk mengubah dan memanfaatkan lingkungan fisiknya berdasarkan atas pandangan-pandangan dan pengetahuan yang dimilikinya mengenai lingkungan tersebut (Ahimsa-Putra, 1995: 14). Bagi Rouse (1972: 96) pola permukiman adalah kajian tentang cara-cara distribusi aktivitas-aktivitas budaya manusia dan pranata-pranata sosialnya keseluruhan kawasan. Pola semacam itu, dapat mencerminkan sistem budaya, sistem sosial, atau sistem ekologi, bahkan juga merupakan cerminan kaitan-kaitan antara ketiga sistem tersebut. Didasarkan pada pengertian-pengertian di atas, secara lebih singkat dapat dirangkum bahwa pola permukiman (*settlement patterns*) merupakan wujud dari tata cara manusia dalam mengatur diri untuk bertempat tinggal dalam lingkungan tempat mereka hidup (Willey, 1953: 11) yang di dalamnya terdapat unsur-unsur tempat tinggal dan relasinya dengan ekologi tertentu, termasuk kondisi geografi dan fisiografi, sistem pengetahuan maupun pranata sosial tertentu (Erawati, 2016).

Terjadinya persebaran permukiman maka akan membentuk pola persebaran permukiman yang dilakukan secara mengelompok, memanjang/seragam, dan tersebar dapat diberi ukuran yang bersifat kuantitatif. Pola permukiman terjadi jika terdapat persebaran penduduk di suatu kota atau desa. Hal ini menunjukkan bahwa antara pola dan

persebaran saling terkait satu dengan yang lainnya. Menurut Rapoport 1969, dalam Herliatin 2016, menjelaskan pola permukiman adalah proses pewadahan fungsional yang didasarkan pada pola aktivitas manusia dan adanya pengaruh *setting* baik fisik maupun non fisik yang secara langsung dapat memengaruhi pola kegiatan serta proses pewadahnya. Pola persebaran yang dilakukan secara seragam (*uniform*), mengelompok (*clustered*), acak (*random*) dan lain sebagainya dapat diberi ukuran yang bersifat kuantitatif. Melalui cara tersebut maka perbandingan antara pola persebaran dapat dilakukan dengan baik, bukan saja dari segi waktu akan tetapi juga dapat dari segi ruang (*space*). Pendekatan ini disebut analisis tetangga terdekat. Analisis seperti ini memerlukan data tentang jarak antara satu obyek dengan obyek tetangganya yang terdekat. Berdasarkan hal tersebut, setiap objek dianggap sebagai sebuah titik dalam ruang. (Yusrina, Sari, Hidayat Pratiwi, Hidayat, Jordan, & Febriyanti, 2018).

Pola persebaran permukiman penduduk dipengaruhi oleh keadaan iklim, keadaan tanah, tata air, topografi dan ketersediaan sumber daya alam yang terdapat di wilayah tersebut. Ada tiga jenis pola pemukiman penduduk berdasarkan teori permukiman secara umum dikaitkan dengan kondisi lahan dan lingkungan sekitarnya, yaitu sebagai berikut:

### 1) Pola Permukiman Memanjang (Linier)

Pola permukiman memanjang memiliki ciri permukiman berupa deretan memanjang karena mengikuti jalan, sungai, rel kereta api atau pantai.

### 2) Pola Permukiman Terpusat

Pola permukiman ini mengelompok membentuk unit-unit yang kecil dan menyebar, umumnya terdapat di daerah pegunungan atau daerah dataran tinggi yang berrelief kasar, dan terkadang daerahnya terisolir. Di daerah pegunungan, pola permukiman memusat mengitari mata air dan tanah yang subur. Sedangkan daerah pertambangan di pedalaman permukiman memusat mendekati lokasi pertambangan. Penduduk yang tinggal di permukiman terpusat biasanya masih memiliki hubungan kekerabatan dan hubungan dalam pekerjaan. Pola permukiman ini sengaja dibuat untuk mempermudah komunikasi antar keluarga atau antar teman bekerja.

### 3) Pola Permukiman Tersebar

Pola permukiman tersebar terdapat di daerah dataran tinggi atau daerah gunung api dan daerah-daerah yang kurang subur. Pada daerah dataran tinggi atau daerah gunung api penduduk akan mendirikan permukiman secara tersebar karena mencari daerah yang tidak terjal, morfologinya rata dan relatif aman. Sedangkan pada daerah kapur, permukiman penduduk akan tersebar mencari daerah yang memiliki kondisi air yang baik. Mata pencaharian penduduk pada pola

permukiman ini sebagian besar dalam bidang pertanian, perkebunan dan peternakan.

#### 4) Pola Permukiman *Cluster*

Pola permukiman *cluster* biasanya terdapat pada permukiman-permukiman tradisional yang sudah terpola karena perilaku masyarakatnya maupun karena tuntutan adat dan tradisi masyarakat (Wiraprama, Zakaria, & Purwantiasning, 2014).

Kajian arkeologi permukiman mulai berkembang mengikuti paradigma baru dalam arkeologi pada umumnya yaitu lebih cenderung mengikuti cara pikir *pasca-prosesual* (*post-processual*). Rob Wiseman (2016), misalnya, menyatakan bahwa unsur-unsur permukiman seringkali dilihat sebagai metafora dari sesuatu yang lain. Artinya, unsur-unsur permukiman itu sebenarnya mewakili unsur budaya yang lain. Misalnya, metafora itu diungkapkan dalam pernyataan “jarak sosial adalah jarak fisik” (*social distance is physical distance*). Dalam permukiman hal itu diwujudkan dalam keletakan setiap tempat atau rumah, sehingga jarak rumah mencerminkan jarak hubungan kekerabatan. Rumah kerabat dekat raja letaknya akan lebih dekat ke keraton tempat raja tinggal jika dibanding letak rumah kerabat jauh. Dengan kata lain, semakin dekat rumah seseorang dengan kraton, semakin dekat pula hubungan kekerabatannya dengan raja. Metafora lain terkait unsur permukiman juga ditunjukkan dari pernyataan seperti “kubur adalah rumah” pada masyarakat menetap, “hutan adalah

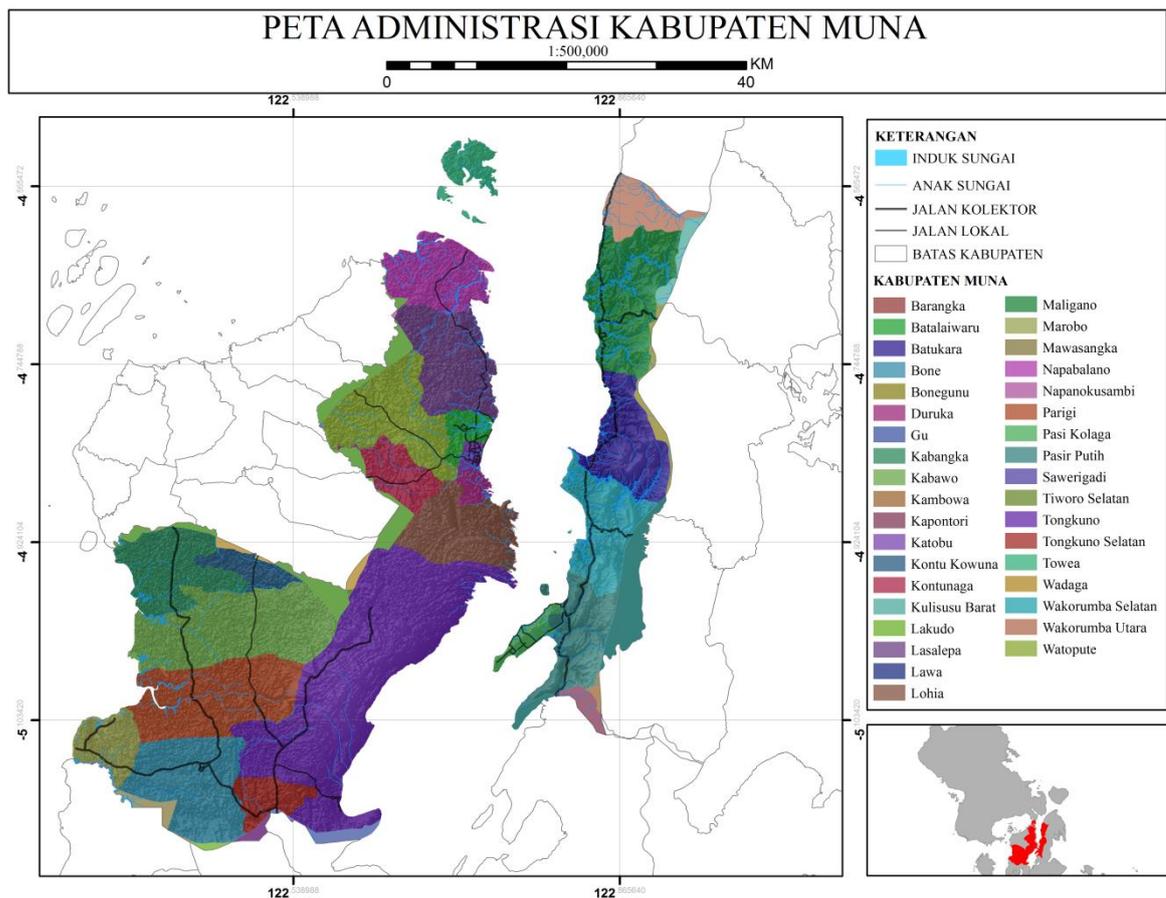
kehidupan” bagi masyarakat pemburu-peramu, atau “bekal kubur adalah pribadi yang dikuburkan.” Dengan cara pikir itu, Wiseman (2016: 2-4) meyakini bahwa dengan memetakan bukti-bukti aktivitas atau data arkeologi dalam permukiman akan dapat terbaca juga jejaring hubungan sosial yang ada. Berdasarkan data hasil penelitian, permukiman dapat didefinisikan sebagai sebuah hasil gagasan, dan tindakan manusia yang dirancang sedemikian rupa sehingga mencerminkan keputusan, pilihan, dan cara manusia melakukan adaptasi secara spesifik. Nilai, norma, kriteria, dan asumsi tertentu dipergunakan dalam menentukan pilihan terhadap hal-hal yang terkait dengan permukiman. Pilihan-pilihan tersebut dapat digambarkan dalam skema sederhana (Rapoport, 1986: 44-45 dalam Erawati, 2016).

## **2.3 Profil Wilayah Penelitian**

### **2.3.1. Letak Geografi**

Kabupaten Muna merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Sulawesi tenggara. Secara astronomis Kabupaten Muna berada pada 4° 15' - 4° 30' Lintang Selatan dan 122° 15' - 123° 00' Bujur Timur. Pada bagian Utara wilayah Kabupaten Muna berbatasan dengan selat Spelman, bagian Barat berbatasan dengan selat Tiworo, bagian Timur berbatasan dengan Kabupaten Buton Utara, dan bagian Selatan berbatasan dengan Kabupaten Buton (Jamaan, 2012) Kabupaten Muna memiliki luas wilayah sebesar 2.963.97 km<sup>2</sup>/296.397 Ha dan terbagi menjadi 22 kecamatan yaitu Tonkuno,

Tongkuno Selatan, parigi, Bone, Marobo, Kabawo, Kontunaga, katobu, Lohia, Batalaiworu, Napabalano, Lasalepa, Towea, Wakorumba Selatan, Pasir Putih, Pasi Kolaga, Maligano, dan Batukara (Statistik, 2020).



**Gambar 1: Peta Administrasi Kabupaten Muna  
(Sistem Informasi Geografis, ArcGis)**

Secara garis besar, ketinggian daratan Kabupaten Muna bervariasi antara 0 - > 1000 m di atas permukaan laut (dpl), tetapi sebagian besar dari luas daratan Kabupaten Muna berada pada ketinggian 25 – 100 m dpl atau sebesar 33,13% dari luas daratan

Kabupaten Muna. Sedangkan luas daratan yang mempunyai ketinggian > 1000 m dpl hanya sekitar 0.02% dari luas keseluruhan daratan Kabupaten Muna.

**Tabel 1 Luas Wilayah Kabupaten Muna Menurut Klasifikasi Ketinggian, 2015**

<b>Ketinggian</b>	<b>Luas (ha)</b>	<b>Persentas</b>
0 – 7 mdpl	38.816	13.10
7 – 25 mdpl	82.162	27.72
25 – 100 mdpl	98.203	33.13
100 – 500 mdpl	76.293	25.74
500 – 1000 mdpl	864	0.29
> 1000 mdpl	59	0.02
<b>Kabupaten Muna</b>	<b>296.397</b>	<b>100.00</b>

*Sumber : BPN Prov. Sulawesi Tenggara*

### **2.3.2. Keadaan Iklim dan Curah Hujan**

Kabupaten Muna memiliki iklim tropis seperti wilayah lainnya yang ada di Indonesia. Rata-rata suhu yang terdapat di Kabupaten Muna sekitar 25° - 75°C. Kabupaten Muna terdiri atas dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan umumnya terjadi pada bulan November sampai dengan bulan Juni. Keadaan tersebut terjadi karena angin yang mengandung banyak uap air bertiup dari benua Asia dan Samudera Pasifik sehingga menyebabkan hujan. Sedangkan musim kemarau terjadi antara bulan Juli sampai dengan bulan Oktober. Keadaan tersebut terjadi

karena di bulan ini angin bertiup dari benua Australia yang sifatnya kering dan sedikit mengandung uap air. Khusus pada bulan April di Kabupaten Muna atau daerah Sulawesi Tenggara pada umumnya angin bertiup dengan arah yang tidak menentu, yang berakibat pada curah hujan yang tidak menentu dan kondisi ini disebut sebagai musim pancaroba (Jamaan, Bentuk Pemukiman Dalam Situs Benteng Kota Muna, 2012).

**Tabel 2 Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Muna, 2015**

<b>Bulan</b>	<b>Curah Hujan (mm<sup>3</sup>)</b>	<b>Hari Hujan</b>
Januari	194.90	16
Februari	350.00	20
Maret	180.60	21
April	336.00	22
Mei	149.80	11
Juni	47.10	13
Juli	4.90	8
Agustus	0.00	0
September	0.00	0
Oktober	0.00	0
November	26.60	5
Desember	178.80	18
Jumlah	1468,70	134

<b>Rata-Rata</b>	<b>122.39</b>	<b>11</b>
------------------	---------------	-----------

*Sumber : BMKG Betoambari, Kota Bau-Bau*

### **2.3.3. Geologi dan Geomorfologi**

Secara umum keadaan bentang alam (morfologi) Kabupaten Muna memperlihatkan kondisi dataran rendah. Gugusan pegunungan kapur yang membentang dari utara ke selatan merupakan hasil pengangkatan pada kala tersier yang dicirikan dengan ditemukannya beberapa jenis binatang laut, menara karst dan pengikisan gelombang laut pada batu gamping tersebut. Tipe perbukitan di 11 daerah Muna merupakan topografi karst yang tercirikan oleh bentuk bukit terjal, puncak bukit membulat, menara-menara karst, dan stalaktit dan stalagmit.

Satuan batuan yang menyusun Pulau Muna terdiri atas batuan endapan kwarter berupa gamping dan batuan endapan laut tersier atas (Whitten, 1987 : 6), dengan jenis tanah fluvisol dan luvisol berwarna kemerahan dan coklat tua atau coklat muda. Penampang Pulau Muna kurang datar terkecuali pada bagian pedalaman terdapat bukit dan pegunungan dengan ketinggian yang bervariasi. Tidak terdapat sungai besar atau sungai kecil sebagai akibat dari keadaan geologi daerah setempat. Batuan gamping yang mendominasi wilayah Muna merupakan batuan penyusun Pulau Muna secara keseluruhan. Hasil analisis petrologi terhadap batuan tersebut adalah sebagai berikut; batu gamping berwarna segar putih kekuningan dan

lapuk berwarna kuning kecoklatan. Teksturnya non-klastik, dengan struktur tidak berlapis, komposisi mineral adalah kalsium karbonat ( $\text{CaCO}_3$ ). Berdasarkan atas genesanya batu gamping ini termasuk pada batuan sedimen kimia. Daerah pantai memperlihatkan kemiringan terjal terutama terdapat di pantai timur bagian tengah, sedangkan tepi lainnya lebih kurang berupa landaian dengan beberapa pulau karang kecil di depannya. Pada zona perbukitan dan gunung tersingkap endapan kapur (gamping) terutama di bagian utara dan tengah pulau tersebut. Pada singkapan ini ditemukan gua atau ceruk (Intan, 2004: 90 dalam Laporan Balar 2012).

#### **2.3.4. Lingkungan dan Mata Pencaharian**

Wilayah Situs Benteng Kota Muna merupakan daerah yang kontur tanahnya berbukit. Hampir sebagian wilayahnya dipenuhi oleh semak belukar yang sangat rapat. Sedangkan pada bagian lahan yang datar, kebanyakan dijadikan sebagai tanah olahan atau perkebunan masyarakat. Lahan kurang akan sumber air, musim tanam seperti pada umumnya terjadi di berbagai daerah beriklim tropis, dimana musim tanam ditentukan oleh bulan sewaktu turun hujan. Satu-satunya sumber air bersih mereka berasal dari air tadah hujan yang dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Adapun jenis-jenis tanaman yang diolah masyarakat setempat, antara lain padi, jagung, kacang tanah, tomat, jenis umbi-umbian dan berbagai tanaman sayuran. Hasil-hasil ini selain

dipergunakan untuk kebutuhan rumah tangga, juga dijual di pasar terdekat atau di pasar Ibu Kota Raha. Selain bercocok tanam, sebagian dari masyarakat desa Kota Muna mencari kegiatan lain sebagai tambahan penghasilan dengan cara berburu ayam hutan atau rusa, yang sangat mudah ditemukan di hutan-hutan dan semak-semak terdekat tidak jauh dari lahan. Sedangkan di masa lalu, jenis-jenis tanaman yang diperoleh yaitu dari hasil kebun masyarakat yang tinggal di luar benteng kota Muna. Berbagai hasil kebun atau ladang, jika panennya berhasil maka sebagian dari hasil tananaman itu di serahkan kepada para kepala kampung yang ditugaskan di tiap-tiap desa, dan selanjutnya di serahkan kepada raja dan para pejabat lainnya. Hasil-hasil kebun atau ladang yang dibudidayakan pada masa itu antara lain, padi, tanaman jagung, buah labu, *kadawa*(sejenis semangka), *ghofa* (ubi talas), *mafu* (sejenis ubi rambat), dan ubi kayu. Selain jenis-jenis tanaman hasil ladang atau kebun, sumber mata pencaharian juga diperoleh dari hasil berburu Rusa, Kadue (sapi liar yang sekarang sudah sangat langka ditemukan), ayam hutan dan lain-lain (Jamaan, 2012).

**Tabel 3 Luas Wilaya Kabupaten Muna Menurut Kecamatan, 2019**

<b>Kecamatan</b>	<b>Ibukota Kecamatan</b>	<b>Luas<sup>1</sup> (km<sup>2</sup>)</b>
Tongkuno	Wakuru	440,98
Tongkuno Selatan	Lawama	57,26
Parigi	Wasolangka	123,76
Bone	Bonekacintala	130,09

Marobo	Marobo	41,37
Kabawo	Lasehao	204,94
Kabangka	Oensuli	97,62
Kontukowuna	Bahutara	70,56
Kontunaga	Liabalano	50,88
Watopute	Wali	100,12
Katobu	Raha	12,88
Lohia	Lohia	49,81
Duruka	Wapunto	11,52
Batalaiworu	Laiworu	22,71
Napabalano	Tampo	105,47
Lasalepa	Bonea	107,92
Towea	Moasi	29,02
Wakorumba Selatan	Pure	95
Pasir Putih	Pola	89,53
Pasi Kolaga	Lambelu	48,77
Maligano	Maligano	98,09
Batukara	Lanobake	69,39
<b>Muna</b>		<b>2057,69</b>

Sumber : BPS Kabupaten Muna 2020 (Kabupaten Muna dalam Angka)

## 2.4 Sejarah Singkat

### 2.4.1. Mitos

Berdasarkan tradisi lisan, Kerajaan Muna dimulai dari kisah pelayaran seorang lelaki bernama ‘Sawerigadi’ (Sawerigading). Perahu yang ia gunakan terbentur pada batu karang di bawah permukaan air laut lalu terdampar. Sawerigading adalah putra *lakina* Luwu, dan dia dilahirkan ibunya bersama dengan seekor ayam kuning

sehingga dianggap sebagai orang mulia. Karena terbenturnya perahu tersebut pada ujung batu karang di bawah permukaan air itu, maka dengan tiba-tiba muncullah daratan besar dari permukaan laut, yaitu Pulau Muna sekarang ini. (gunung tempat terdamparnya perahu Sawerigading itu masih dapat ditunjukkan. Nama gunung itu Bahutara; tempat ini tak jauh dari kota Muna yang dahulu. Di atas gunung itu sampai sekarang terdapat sebuah batu besar yang menyerupai perahu.

Setelah perahunya terdampar, berjalanlah Sawirigadi di atas daratan yang baru muncul itu sampai pada Wisenokontu (di sekitar kampung Tanjung Batu sekarang), dan dari sana ia kembali ke tanah asalnya di seberang (*wiseno kontu* berarti 'di depan batu'). Setelah itu *lakina* Luwu mengutus beberapa orang untuk pergi mencari perahu Sawirigadi. Sebagian dari orang-orang ini konon menetap di sini dan merupakan penghuni pertama Pulau Muna kemudian mereka mendirikan suatu koloni yang mereka namakan Wamelai. (Arti nama ini tidak lagi diketahui. Kampung ini hingga sekarang masih ada, akan tetapi kini merupakan bagian dari kampung Tongkuno).

Setelah beberapa lama mereka menetap di sini, maka sebagian dari orang yang terdiri atas laki-laki itu kembali ke tempat asal mereka untuk mengambil istri-istri dan anak-anak mereka yang tertinggal di sana untuk dibawa ke Muna. Sekembalinya mereka, maka atas musyawarah bersama lalu ditunjuklah seorang kepala yang diberi

gelar '*mino* Wamelai'. Suatu hari dibangunlah sebuah rumah besar untuk *mino* tersebut, akan tetapi mereka kekurangan bambu untuk membuat lantainya. Jadi Sang *mino* menyuruh empat orang pembantunya (*kafowawe*) untuk pergi mencari bambu di hutan untuk keperluan rumah tersebut. Keempat laki-laki itu lalu mencarinya ke seluruh kawasan hutan dan pada akhirnya mereka menemukan sebatang pohon bambu besar serta tebal. Tempat ditemukannya bambu tersebut saat ini disebut Kampung Barangka.

Ketika mereka hendak memotong bambu itu tiba-tiba terdengar suara seseorang dari pohon bambu itu. Mereka tidak berani memotongnya dan kembali ke kampong dengan tangan hampa. Mereka menceritakan kepada *mino* bahwa mereka telah menemukan sebatang bambu, akan tetapi mereka tidak berani memotongnya, karena bilamana mereka hendak memotong bambu bagian bawahnya, terdengar suara yang mengatakan "Aduh, betisku/kakiku", jika dipotong agak tinggi, maka terdengarlah suara yang sama "Aduh, punggungku", dan bila dipotong lebih tinggi lagi, terdengar lagi "Aduh kepalaku". Sang *mino* tidak percaya akan ceritera mereka, tetapi mengira mereka malas. Lalu orang itu disuruh kembali ke hutan dengan perintah keras untuk membawa bambu itu, karena bilamana mereka kembali tanpa bambu, maka mereka akan dibunuh. Untuk mengawasi mereka, diikutsertakan orang kelima. Sesampainya di lokasi bambu tersebut, orang yang kelima itu segera hendak

memotongnya, akan tetapi iapun mendengarkan kata-kata yang sama. Namun, tanpa bambu mereka tidak berani kembali ke kampung, sehingga mereka menggali bambu itu dan membawanya ke kampung. Sang *mino*, yang mendengar laporan dari orang kelima mengenai suara itu, kini hendak juga mencoba membelah bambu itu, akan tetapi iapun mendengar kata-kata yang sama. Kemudian ia memanggil seluruh rakyat untuk berkumpul di depan rumahnya dan menyuruh mereka untuk menjaga bambu itu.

Setelah bambu itu dijaga empat puluh hari empat puluh malam lamanya, masuklah suatu berita aneh. Dua orang lelaki dari Wamelai yang bernama La Lele dan La Katumende, waktu menjelajahi pulau Muna dan tiba di pesisir pantai yang kini terletak kampung Lohia, tiba-tiba melihat seorang wanita duduk di atas *palangga* (sebuah pinggan batu yang besar) datang terapung, di sekitar Pulau Lima. Wanita tersebut lalu ditangkap oleh mereka, kemudian La Katumende pulang kembali ke Wamelai untuk memberitahukan kepada Mino mengenai tangkapannya yang luar biasa ini. *Mino* lalu menyuruh agar wanita itu dibawa ke Wamelai.

Wanita itu ternyata adalah putri *lakina* Luwu dan saudara perempuan Sawerigading. Ketika Sawerigading kembali ke Luwu dari Muna, didapati ayahnya dalam kesusahan besar karena anak gadisnya yang belum menikah, yaitu saudara perempuan Sawerigading, Tandiabe namanya, sedang hamil serta tidak mau atau tidak dapat

mengatakan siapa yang menghamilinya. Satu-satunya yang ia katakan ialah bahwa ayah anaknya itu tidak tinggal di Luwu, melainkan di Timur. Ketika dibawa ke Wamelai, ia diletakkan di depan rumah *mino*, di mana seluruh rakyat mengagumi wanita itu yang muncul dari laut di atas sebuah batu. Tiba-tiba terdengar lagi suara dari dalam bambu yang ditunjukkan kepada wanita itu, ‘Engkau menjadi istriku’. Wanita itu lalu menjawab, ‘Saya dalam keadaan begini karena ulahmu’. Oleh karena itu, atas perintah *mino*, wanita itu yang telah diberi nama *Sangke Palangga* (‘diambil dari pinggan batu’) bersama dengan bambu itu dibawa ke Lambubalano (letaknya dekat Kota Muna, di sebelah kanan jalan menuju kota).

Keempat lelaki yang membawa bambu itu dari hutan ke Wamelai, kini juga membawanya ke Lambubalano dan membelahnya di sana atas perintah *mino*. Ketika bambu itu dibelah, muncullah seorang lelaki. Ketika melihat keempat lelaki itu dia berkata, ‘*Kamu tanom baura-uramo, tanom balembu-lembomo, tanom batala-talamo, pedamo ndoke*’. Adapun makna kata-kata ini, tidak diketahui lagi, tetapi sesuai dengan kata-kata ini keempat lelaki itu memperoleh nama-nama mereka, secara berurut La Kaura, La Lembo, La Kancitala, dan La Ndoke. Keturunan mereka sekarang ini adalah *fato lindono*.

Lelaki yang muncul dari bambu itu oleh rakyat Wamelai diberi nama menurut asalnya, yaitu *Bheteno ne Tombula* (‘dilahirkan di

dalam bambu'). Dia bersama wanita Sangke Palangga dibawa kembali ke Wamelai di mana mereka menikah dan mendapat tempat tinggal di rumah *mino*. Dari perkawinan itu lahirlah tiga orang anak yaitu: yang pertama seorang putra yang bernama Runtu Wulau; anak kedua seorang putri bernama Kila Mbibito, dan anak ketiga seorang putra pula yang diberi nama Kaghua Bhangkano. Runtu Wulau kemudian kembali ke Luwu; Kila Mbibito menikah dengan La Singkakabu, putra *mino* Wamelai, dan Kaghua Bhangkano juga menetap di Wamelai di mana iapun menikah dan keturunan dari pasangan inilah yang kemudian menjadi raja di Muna (Couvreur, Terjemahan 2001).

Pada masa pemerintahan cucu La mbano, yaitu Sugi La Ende, mulai didirikan 4 kampung yang kemudian dihimpun menjadi satu *fato lindono* (empat bagian). Sugi La Ende kemudian digantikan oleh putranya bernama Sugi Manuru yang mempunyai 14 orang anak. Salah satu dari 14 orang anak tersebut bernama La Kila Ponto yang kemudian menjadi Raja Muna, dan diangkat menjadi Sultan di kerajaan Buton. Adapun nama raja-raja Muna yang pernah memerintah, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 4 Nama-nama Raja Muna**

No	Raja Yang Memerintah	Periode Tahun
1	La Eli (Bhateno netombula	1321-1350 M
2	Koghua Bangkano Fotu (Sugi Patola)	1350-1385

3	Sugi Patani	1385-1415
4	Sugi La Mbano	1415-1444
5	Sugi La Ende	1444-1479
6	Sugi Manuru	1479-1527
7	La Kilaponto (Murhum)	1527-1530
8	La Posasu	1530-1555
9	Rumpu Isomba (Sangia Tekara Wawono)	1555-1575
10	Laode Saadudin	1575-1585
11	Laode Ngkadiri (Sangia Kainde)	1585-1614
12	Laode Rahman (Sangia Latugho)	1614-1654
13	Laode Husaini (Omputo Sangia)	1654-1695
14	Laode Kentu Koda (Kantolalo)	1715-1720
15	Laode Harisi (Negege)	1720-1743
16	Laode Umara (Pejabat sementara Raja Muna	-
17	Laode Mursali (Sangia Gola)	1743-1763
18	Laode Ngkusambi (Kalaoui)	1788-1800
19	Laode Ismail (Nesombo)	1800-1830
20	Laode Saete (Omputo Sora Masigi)	1830-1845
21	Laode Bulai (Sangia La Ghada)	1861
22	Laode Kaili (Sangia Te Tobeia)	1875-1882
23	Laode Ahmad Maktubu (Milano We Kalele)	1907-1914
24	Laode Muhamad Afiu (Milano Se Waara)	1922-1924
25	Laode Rere (Omputo Arowuna)	1927- 1928
26	Laode Dika	1930-1938

27	Laode Pandu (Milano Te Kosandano)	1948-1959
----	-----------------------------------	-----------

#### 2.4.2 Periode masa pembangunan benteng Kota Wuna

Pada masa pemerintahan Sugi Manuru tidak ada perubahan di Muna, namun setelah digantikan oleh putranya Lakilaponto yang di Muna bernama La Tolalaka, di Buton dipanggil Murhum, dan di Laiwui bernama Lakilaponto. Murhum ini yang pertama terpilih sebagai kepala seluruh Muna oleh keempat *kamokula* bersama keempat *mino*. Dengan demikian dia mendapat gelar *omputo* atau ‘tuan kita’. Kerajaan Muna dibangun pada masa pemerintahan raja ke 7, yaitu La Kila Ponto pada tahun 1527-1530. La Kila Ponto mendirikan sebuah benteng atas perintah ayahnya Sugi Manuru, sebagai lokasi pemerintahan baru yang sebelumnya berada di luar Benteng Kota Muna. Pada masa pemerintahan La Kila Ponto, kampung-kampung terdiri atas 28 bagian, yang masing-masing dipimpin oleh seorang *Kino* dan *Mino* yaitu sebagai berikut:

**Tabel 5 Nama-nama Kampung**

Nama-nama Kampung	
Lagadi	Wasolangka
Lasehao	Bombonawulu
Lahontohe	Lakudo
Labora	Tobea
Lohia	Mantobua
Rete	Madawa

Kasaka	Labongkuru
Lagusi	Laiworu
Waleale	Lakologou
Latongku	Watumela
Waulai	Walelei
Laiba	Bea
Lasosodo	Lakawohe
Latompe	Laloiya

Setelah La Kila Ponto diangkat Menjadi sultan di Kerajaan Buton, kedudukan raja di Muna digantikan oleh adiknya, bernama La Posasu. Pada masa pemerintahan raja La Posasu selain melanjutkan pembangunan benteng sebagai pusat Kerajaan Muna yang baru, juga mulai membangun berbagai fasilitas kerajaan yang sebelumnya tidak ada. Dimasa ini juga, Islam telah masuk dan menjadi agama resmi kerajaan Muna. Masuknya islam dibawa oleh seorang ulama bernama Abdul Wahid, yang berasal dari Mekah. Pada masa itu mulailah didirikan fasilitas pengajaran agama Islam, dan kemudian didirikan sebuah Masjid.Selanjutnya pada masa pemerintaha raja Rumpu Issomba (1555-1575), kampung bertambah, yaitu kampung Katobu, Tongkuno, Kabawo, dan Lawa. Pada masa pemerintahan Raja Rumpu Isomba sektor bidang pertanian dan perikanan telah dikembangkan. Hasil-hasil bumi di ekspor ke bandarbandar Sombaopu, Bulukumba, Bajoe Bone, bahkan sampai pada Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara (Laode Ongga). Wilayah perairan kerajaan Muna pada masa itu

terletak di wilayah perairan sebelah barat dan wilayah perairan sebelah timur, yang masing-masing wilayah di jaga oleh seorang panglima perang atau Kapitlao.

### 2.4.3 Strata Sosial

Sistem penggolongan masyarakat diterapkan di Muna pada zaman *lakina* Muna Titakono dan *bhonto bhalano* yang pertama, yaitu La Marati. Dalam peraturan penggolongan tersebut telah digariskan bahwa keturunan mantan Sugi adalah golongan tertinggi di Muna. Mereka merupakan golongan *kaomu* dan gelarnya adalah La Ode. Jadi, apabila di Muna disebut orang *kaomu* maka yang dimaksud ialah keturunan mantan Sugi dan sekarang juga keturunan mantan *lakina* Muna. Semua *lakina* Muna keturunan mantan Sugi.

Sebagai golongan tertinggi yang kedua adalah keturunan *bhonto bhalano* yang pertama, La Marati, mereka adalah golongan *walaka.*, La Marati adalah putra Wa Ode Pogo. Wa Ode Pogo adalah saudara perempuan Lakilaponto (Sultan Murhum) dan Sugi La Pusaso. Dengan demikian, Wa Ode Pogo termasuk golongan orang *kaomu*. Karena Wa Ode Pogo menikah dengan La Pokainsi yang bukan keturunan Sugi, maka telah ditentukan bahwa anak-anaknya dan keturunannya termasuk golongan yang lebih rendah daripada orang *kaomu*. Namun, mereka juga memakai nama La Ode. Karena pada akhirnya hal ini menyebabkan kekeliruan, maka kata La Ode

tidak dipakai lagi oleh kaum *walaka*, dan sekarang dipakai kata *La* di depan nama mereka. Selanjutnya, ditentukan bahwa hanya orang *kaomu* yang dibolehkan menjadi *lakina* Muna, sedangkan golongan *walaka* hanya bisa menjadi *bhonto bhalano*.

Selanjutnya yaitu golongan *maradika*, yang terdiri atas tiga kelompok. Kelompok yang pertama, yaitu tingkat yang tertinggi adalah *anangkolaki*, atau *fitu bhengkauno* yang berarti ‘tujuh orang’. *anangkolaki* digolongkan sebagai kaum *maradika* karena ayahnya adalah seorang Sugi sedangkan ibunya adalah seorang budak, maka tingkatannya adalah lebih tinggi daripada kaum *maradika* lainnya. mereka bukan keturunan asli kaum Sugi, sehingga mereka tidak berhak memakai gelar *La Ode*. Pada mulanya keturunan mereka ini bisa menjadi *kino* atau bahkan menjabat kedudukan yang lebih tinggi lagi; mulanya mereka juga berdiam dalam kota Muna. Kemudian, di bawah kekuasaan Titakono, mereka ini digolongkan sebagai kaum *maradika*, dan akibatnya tidak dapat menjabat lagi serta harus meninggalkan kota Muna.

Kelompok kedua dari golongan *maradika* adalah yang disebut *maradikano ghoera* atau *maradikano papara*. Mereka ini adalah keturunan mantan empat *kamokula* (yaitu *kamokulano* Tongkuno, Barangka, Lindo, dan Wapepi). para *maradikano ghoera* disamaratakan dengan golongan terendah kaum *maradika*, yaitu *maradika poinokontu lakonosau*. Ini adalah sejenis hukuman, karena

mereka semula dilarang untuk berdiam di kampung yang dipimpin oleh seorang *kino*, larangan ini beralasan untuk menghindari pernikahan campuran dengan golongan terendah.

Kelompok ketiga dan yang paling rendah dari golongan *maradika* adalah kaum *maradika poinokontu lakonosau* (yang berarti *maradika* serupa sebuah batu dan sepotong kayu, dengan kata lain tidak bernilai). Mereka ini adalah keturunan dari keempat *lindono* (Kancitala, Lembo, Kaura dan Ondoke) dan karena keturunan kaum *kafuwawe* (pelayan *mino* Wamelai yang pertama), maka mereka lebih rendah dari keturunan keempat *kamokula*. Mereka ini adalah golongan terendah dari seluruh penduduk Muna, di luar golongan budak.

Golongan yang terakhir adalah golongan budak. Mereka ini berasal dari golongan *maradika*, kemudian dihukum menjadi budak karena berbuat kejahatan atau tidak melunasi hutang-hutangnya, tawanan juga termasuk golongan budak. Para budak sama sekali tidak ada hak-haknya, sehingga pernikahan antara budak-budak tidak disahkan.